

INDIKATOR

**KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

PROVINSI ACEH



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI ACEH**





INDIKATOR

**KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

PROVINSI ACEH



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

PROVINSI ACEH

2018

<https://aceh.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI ACEH 2018

No. Publikasi : 11550.1825
Katalog BPS : 4102004.11
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xi + 107 halaman

Naskah :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Aceh

Gambar Kulit :
Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
BPS Provinsi Aceh

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Pengarah **Drs. WAHYUDIN, M.M.** Editor **Ir. ANDARIATI AFRIDA – Dr. Azwar** Penulis **RIZKI HADIMAN,**
SST Perancang Tata Letak **RIZKI HADIMAN, SST** Perancang Sampul **RIZKI HADIMAN, SST**

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh 2018 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Aceh antar waktu, menurut kabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan). Data yang digunakan bersumber dari BPS maupun Dinas atau Badan terkait. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan dan untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Banda Aceh, November 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh



Drs. Wahyudin, M.M

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
Singkatan dan Akronim	xi
Bab 1 Kependudukan	1
Bab 2 Kesehatan dan Gizi	17
Bab 3 Pendidikan	29
Bab 4 Ketenagakerjaan	43
Bab 5 Taraf dan Pola Konsumsi	53
Bab 6 Perumahan dan Lingkungan	61
Bab 7 Kemiskinan	69
Bab 8 Sosial Lainnya	75
Daftar Pustaka	79
Lampiran	83
Sumber Data	106

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2013-2017	5
1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2017	7
1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017	9
1.4 Persentase Balita Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	10
1.5 Persentase Wanita Usia Subur (WUS) Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	11
1.6 Rasio Ibu Dan Anak Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	11
1.7 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017	13
1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Dan Berstatus Kawin Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2013-2017	15

KESEHATAN DAN GIZI

2.1 Umur Harapan Hidup di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	20
2.2 Angka Kesakitan Dan Rata-Rata Lamanya Sakit, 2016 dan 2017	21
2.3 Rata-Rata Lama Baduta Disusui Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2016 dan 2017	23

2.4	Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2017	25
2.5	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2017	25
2.6	Jumlah Puskesmas Dan Rasionya Terhadap Penduduk, 2013-2017	27

PENDIDIKAN

3.1	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Aceh, 2014-2017.....	35
3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Dan Daerah Tempat Tinggal, 2016 dan 2017	36
3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2016 dan 2017.....	38

KETENAGAKERJAAN

4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2016 dan 2017 (Agustus).....	46
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2016 dan 2017 (Agustus)	48
4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2015 dan 2016 (Agustus).....	50
4.4	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017 (Agustus).....	51

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 dan 2017	56
-----	---	----

5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016 dan 2017.....	57
5.3 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah), 2016 dan 2017	58
5.4 Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2017	59

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016 dan 2017.....	65
6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016 dan 2017	66

KEMISKINAN

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2012-2017	72
7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, September 2015-Maret 2017.....	74

SOSIAL LAINNYA

8.1 Persentase Penduduk 5 tahun keatas yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Aceh Tahun 2017.....	79
8.2a Persentase Rumah Tangga Perkotaan Yang Memiliki Alat Komunikasi Dan Informasi Di Provisini Aceh Tahun 2013-2017	80
8.2bPersentase Rumah Tangga Perdesaan Yang Memiliki Alat Komunikasi Dan Informasi Di Provisini Aceh Tahun 2013-2017	80
8.2c Persentase Rumah Tangga Perkotaan Dan Perdesaan Yang Memiliki Alat Komunikasi Dan Informasi Di Provisini Aceh Tahun 2013-2017	80
8.3a Beberapa Indikator Raskin Menurut Daerah Perkotaan Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	82
8.3b Beberapa Indikator Raskin Menurut Daerah Perdesaan Di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	82

8.3c Beberapa Indikator Raskin Menurut Daerah Perkotaan Dan Perdesaan Di
Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

82

<https://aceh.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Aceh, 2015-2017	4
1.2 Angka Beban Ketergantungan, 2015-2017.....	8
1.3 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017	14
2.1 Angka Kesakitan (%), 2016 dan 2017	20
3.1 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Aceh, 2015-2017.....	33
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Aceh, 2015-2017	34
4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Aceh, 2016 dan 2017.....	47
4.2 Persentase Penduduk Umur 15+ Tahun yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2016 dan 2017	49
5.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 dan 2017	55
5.2 Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2017.....	58
6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016 dan 2017.....	64
7.1 Garis Kemiskinan (ribu Rp./Kapita/Bulan), September 2015-Maret 2017 ...	73
8.1 Persentase Rumah Tangga Pembeli Raskin di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017	81

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
MA	Madrasah Aliyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka



BAB I

KEPENDUDUKAN



Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta distribusi penduduk yang tidak merata dapat menjadi masalah di waktu mendatang.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Aceh pada 2017 tercatat sekitar 5.189,47 ribu jiwa atau sekitar satu persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 261,89 juta jiwa pada tahun 2017. Jumlah penduduk Aceh mengalami kenaikan sekitar 93,2 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 5.096,25 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013, jumlah penduduk Aceh saat ini mengalami peningkatan sekitar 7,86 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Aceh telah mengalami penambahan penduduk sebesar 378,33 ribu jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Aceh pada tahun 2017 tercatat sebesar 1,83 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk Aceh sebesar 1,89 dan 1,94 pada tahun 2015. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk telah menunjukkan adanya keberhasilan.

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada periode 2016-2017 laju pertumbuhan penduduk di 14 kabupaten/kota berada di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Singkil (2,38 persen), diikuti Kabupaten Aceh Jaya (2,28 persen), dan Kabupaten Pidie Jaya (2,19 persen). Sementara itu, 9 kabupaten mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Sabang (1,06 persen), Simeulue (1,20 persen) dan Aceh Selatan dan Aceh Tamiang (masing-masing 1,44 persen) (Lampiran I.1).

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Aceh, 2015-2017



Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, 2013-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	4 811 133	2,04	99,62
2014	4 906 835	1,99	99,67
2015	5 001 953	1,94	99,72
2016	5 096 248	1,89	99,76
2017	5 189 466	1,83	99,80

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Aceh pada tahun 2017 sebesar 99,80. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 99 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk perempuan di Aceh lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin berdasarkan kabupaten/kota, dari 23 kabupaten/kota di Aceh sebanyak 11 kabupaten/kota memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100. Rasio jenis kelamin terkecil terdapat di Pidie (93,71) dan diikuti oleh Pidie Jaya (95,01), Bireuen (95,84), dan Aceh Selatan (97,00). Sementara itu, dari 12 kabupaten/kota dengan rasio jenis kelamin diatas 100, kabupaten/kota yang memiliki rasio jenis kelamin tertinggi adalah Aceh Jaya (107,76), Banda Aceh (105,98), dan Simeulue (105,81). (Lampiran I.2).

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk juga terjadi di Aceh. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk

yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Persebaran dan kepadatan penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh tampak masih sangat timpang. Pada Lampiran I.1 terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk terbanyak masih terdapat pada lima kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara sebesar 11,61 persen, Bireuen sebesar 8,73 persen, Pidie sebesar 8,34 persen, Aceh Timur sebesar 8,09 persen dan Aceh Besar sebesar 7,88 persen. Gabungan kelima kabupaten tersebut hampir setengah penduduk Provinsi Aceh yaitu sebesar 44,65 persen. Sedangkan kabupaten yang paling sedikit penduduknya terdapat di Kota Sabang yang merupakan daerah pulau, yaitu hanya dihuni oleh 0,65 persen dari total penduduk Provinsi Aceh. Selanjutnya diikuti oleh Kota Subulussalam sebesar 1,52 persen, Aceh Jaya sebesar 1,73 persen, Gayo Lues sebesar 1,75 persen dan Simeulue sebesar 1,76 persen.

Pada Tabel 1.2 terlihat kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota yang belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas lebih lengkap yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah perdesaan untuk pindah ke daerah perkotaan. Masalah yang sering timbul akibat kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga memperlambat arus urbanisasi.

Kota Banda Aceh merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 4.641 jiwa per km² pada tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah terjarang dengan kepadatan penduduk hanya 16 jiwa per km².

Tabel 1.2 Kepadatan dan Distribusi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
Simeulue	50	1,76
Aceh Singkil	64	2,30
Aceh Selatan	56	4,47
Aceh Tenggara	50	4,02
Aceh Timur	77	8,09
Aceh Tengah	46	3,94
Aceh Barat	73	3,89
Aceh Besar	141	7,88
Pidie	136	8,34
Bireuen	252	8,73
Aceh Utara	224	11,61
Aceh Barat Daya	77	2,81
Gayo Lues	16	1,75
Aceh Tamiang	135	5,53
Nagan Raya	46	3,11
Aceh Jaya	23	1,73
Bener Meriah	75	2,75
Pidie Jaya	163	2,98
Banda Aceh	4 641	5,01
Sabang	279	0,65
Langsa	845	3,31
Lhokseumawe	1 301	3,83
Subulussalam	67	1,52
Aceh	91	100,00

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Selama periode 2015-2016 kepadatan penduduk di Provinsi Aceh mengalami peningkatan yaitu dari 90 jiwa per km² meningkat menjadi 91 jiwa per km². Pada tahun 2017, Kota Banda Aceh yang luasnya hanya 56,17 km² (0,10 persen dari total luas Aceh), merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk mencapai 4.641 jiwa per km², angka ini meningkat dibanding tahun 2016, yaitu 4.552 jiwa per km². Kemudian diikuti oleh Kota Lhokseumawe dengan kepadatan penduduknya 1.301 jiwa per km² dan Kota Langsa dengan kepadatan 845 per jiwa km² pada tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah yang terjarang penduduknya dengan

kepadatan penduduk 16 jiwa per km² diikuti oleh Kabupaten Aceh Jaya dengan kepadatan penduduk 23 jiwa per km².(Lampiran I.3)

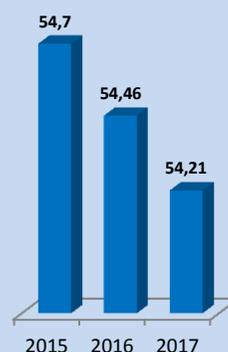
Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2013-2017 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka beban tanggungan Aceh sebesar 55,11 persen, hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 55 penduduk usia tidak produktif. Sampai pada tahun 2017, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 54,21 persen. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 54 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan, 2015-2017



investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat termanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 ada sebanyak 31,74 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 31,47 persen pada tahun 2015. Hingga tahun 2017 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 31,11 persen.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, 2013-2017

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	31,74	64,47	3,79	55,11
2014	31,60	64,57	3,83	54,88
2015	31,47	64,64	3,89	54,70
2016	31,30	64,74	3,96	54,46
2017	31,11	64,85	4,04	54,21

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Pada Tabel 1.3. juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Aceh masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 mencapai 64,57 persen pada tahun 2014 dan kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 64,74 persen dan kembali meningkat menjadi 64,85 persen pada tahun 2017. Hal ini

menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Aceh menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) juga semakin bertambah dari 3,79 persen pada tahun 2013 menjadi 3,83 persen pada tahun 2014 dan 4,04 persen pada tahun 2017.

Rasio Ibu dan Anak

Rasio ibu dan anak merupakan perbandingan jumlah balita berusia 0 hingga 4 tahun dengan perempuan usia reproduksi yaitu jumlah perempuan yang masuk dalam kelompok umur 15-49 tahun. Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa selama tahun 2016-2017 persentase balita terhadap penduduk mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 10,15 persen menjadi 10,62 persen. Peningkatan persentase ini terjadi baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Persentase jumlah perempuan usia 15-49 tahun mengalami penurunan dari sebesar 54,50 persen menjadi sebesar 54,49 persen. Jika dilihat menurut tempat tinggal di daerah perkotaan dan perdesaan sama-sama mengalami penurunan masing-masing menjadi 55,92 persen dan 53,88 persen.

Tabel 1.4 Persentase Balita Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Tahun	Tipe Daerah		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	9,92	10,26	10,16
2014	9,91	10,38	10,25
2015	10,00	10,25	10,18
2016	9,96	10,23	10,15
2017	10,54	10,65	10,62

Sumber: BPS, 2018

Adanya kenaikan persentase balita dan menurunnya persentase perempuan usia reproduksi menyebabkan persentase rasio ibu dan anak naik yaitu dari sebesar 372 pada tahun 2016 menjadi sebesar 389 pada tahun 2017. Artinya pada tahun 2017 terdapat 389 anak berusia 0-4 tahun per seribu perempuan usia 15-49 tahun. Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 372 anak berusia 0-4 tahun per seribu perempuan usia 15-49 tahun. Menurut daerah tempat tinggal, rasio ibu anak di perkotaan dan perdesaan meningkat yaitu 378 dan 394.

Tabel 1.5 Persentase wanita Usia Subur (WUS) Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Tahun	Tipe Daerah		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	28,29	27,25	27,54
2014	28,06	26,86	27,20
2015	33,40	33,56	33,51
2016	56,30	53,76	54,50
2017	55,92	53,88	54,49

Sumber: BPS, 2018

Tabel 1.6 Rasio Ibu dan Anak Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Tahun	Tipe Daerah		
	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	351	376	369
2014	353	386	377
2015	360	381	375
2016	355	379	372
2017	378	394	389

Sumber: BPS, 2018

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017, persentase wanita di Provinsi Aceh sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun. Jika dilihat persentasenya pada tahun 2017 sebesar 53,99 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 53,18 persen. Yang terbesar berikutnya yaitu pada kelompok usia kawin 16-18 tahun, persentasenya meningkat dari 23,90 persen menjadi 23,97 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk kelompok umur 10-15 tahun, persentasenya menurun dari 5,18 persen pada 2016 menjadi 4,73 persen pada 2017.

Persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi pada tahun 2016 terdapat di Kabupaten Nagan Raya sebesar 9,32 persen diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Barat masing-masing sebesar 9,14 persen dan 8,88 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Bireuen sebesar 1,92 persen.

Tabel 1.7 Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, 2016 dan 2017

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10-15	3,51	3,53	5,83	5,22	5,18	4,73
16-18	17,26	17,51	26,49	26,64	23,90	23,97
19-24	55,69	55,65	52,20	53,31	53,18	53,99
25 +	23,54	23,31	15,48	14,83	17,74	17,31

Sumber: BPS, 2018

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur kurang dari 16 tahun pada tahun 2016 cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan yaitu 5,22 persen berbanding 3,53 persen. Demikian pula yang terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu di daerah perdesaan sebesar 26,64 persen dan di perkotaan sebesar 17,51 persen. Sebaliknya pada kelompok umur 19 tahun ke atas, di perkotaan memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Pada kelompok umur 19-24 tahun persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya di perkotaan sebesar 55,65 persen sedangkan di perdesaan sebesar 53,31 persen. Sementara itu, pada wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada umur 25 tahun ke atas di perkotaan sebesar 23,31 persen sedangkan di perdesaan sebesar 14,83 persen.

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2017, dari 23 kabupaten/kota, terdapat 10 kabupaten/kota yang menunjukkan persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun lebih tinggi dari persentase angka provinsi. Persentase wanita yang melakukan

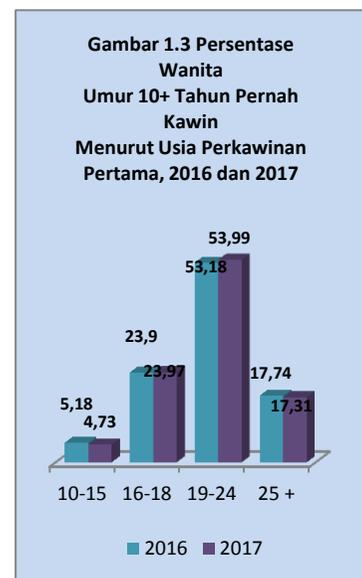
perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi pada tahun 2017 terdapat di Kabupaten Nagan Raya sebesar 9,32 persen diikuti oleh Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Barat masing-masing sebesar 9,14 persen dan 8,88 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Bireuen sebesar 1,92 persen.

Pada level provinsi, sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertamanya berada pada kelompok usia 19-24 tahun. Begitu pula kabupaten/kota di Provinsi Aceh mayoritas usia kawin pertama wanita nya berada pada kelompok umur 19-24 tahun ke atas. Terbanyak berikutnya yaitu enduduk Aceh melakukan perkawinan pertama pada kelompok usia 16-18 tahun. Namun, ada pula beberapa daerah yang lebih banyak memilih perkawinan pertama pada usia 25 tahun ke atas dibanding 16-18 tahun, diantaranya yaitu sebagian besar wilayah perkotaan seperti Banda Aceh yang mencapai 27,74 persen, Sabang mencapai 23,77 persen, Langsa 22,28 persen, dan Lhokseumawe 22,95 persen. Selain itu terdapat pula Aceh Besar dan Bener Meriah yang masing-masing mencapai 24,20 persen dan 21,77 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran I (4).

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Gambaran mengenai cakupan penggunaan KB dapat



dilihat pada Tabel 1.8 yang menunjukkan bahwa persentase perempuan berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin yang menjadi akseptor KB pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dari sebesar 45,08 persen menjadi sebesar 44,38 persen.

Tabel 1.8 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, 2013-2017

Jenis Alat/Cara KB	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AKDR/IUD/spiral	2,79	3,00	3,87	4,94	4,90
Suntikan KB	66,11	66,76	67,30	66,96	65,52
Susuk KB/ norplan/ implan/ alwalit	1,63	1,90	2,80	2,63	2,71
Pil KB	26,42	24,62	22,68	21,56	21,56
Kondom/karet KB	0,38	0,99	1,10	1,16	1,28
Lainnya	2,66	2,73	2,25	2,75	4,03
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	31,96	32,54	46,92	45,08	44,38

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan metode/alat KB yang digunakan, Tabel 1.8 memperlihatkan bahwa sebagian besar akseptor KB memilih metode suntikan dengan persentase pengguna sebesar 65,52 persen tahun 2017, dimungkinkan karena kemudahan dan kepraktisan dalam penggunaannya merupakan salah satu faktor penyebab alat tersebut menjadi pilihan para perempuan akseptor KB.

Metode lain yang menjadi pilihan terbanyak adalah pil KB dengan persentase pengguna sebesar 21,56 persen pada tahun 2017. Sedangkan metode/alat KB yang paling sedikit digunakan

adalah kondom/karet KB dan susuk KB/norplan dan dengan persentase akseptor masing-masing sebesar 1,28 persen dan 2,81 persen tahun 2017. Fenomena dalam memilih alat/metode KB tersebut mempunyai kecenderungan yang relatif sama antara daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

<https://aceh.bps.go.id>



BAB II

KESEHATAN DAN GIZI



Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan umur harapan hidup.

Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain umur harapan hidup, Angka Kesakitan, Pemberian ASI Balita, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah umur harapan hidup, meningkatnya umur harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk.

Tabel 2.1 Umur Harapan Hidup di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Tahun	Umur Harapan Hidup
(1)	(2)
2013	69,31
2014	69,35
2015	69,50
2016	69,51
2017	69,52

Sumber : BPS, 2018

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa, selama periode 2013-2017 umur harapan hidup mengalami peningkatan yaitu dari 69,31 menjadi 69,52. Hal ini menggambarkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2013 diperkirakan akan mampu bertahan hidup rata-rata sampai berumur 69,31 tahun, dan meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai 69,52 tahun sehingga berarti derajat kesehatan masyarakat selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Indikator lainnya yang dapat menunjukkan derajat kesehatan penduduk yaitu angka morbiditas. Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan



yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Aceh mencapai 13,84 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 14,21 persen. Angka Kesakitan penduduk tahun 2017 yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, masing-masing sekitar 14,14 persen dan 13,15 persen.

Tabel 2.2 Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit, 2016 dan 2017

Daerah Tempat Tinggal	Angka Kesakitan (%)		Lama Sakit (Hari)	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	7,93	13,15	5,69	5,34
Perdesaan	20,46	14,14	6,23	5,58
Perkotaan+ Perdesaan	14,21	13,84	6,08	5,51

Sumber: BPS, 2018

Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Menurunnya angka morbiditas pada tahun 2017 tidak dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang lebih baik, jika tidak diikuti dengan menurunnya rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun 2016 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 6 hari dan menurun menjadi kisaran 5 hari pada tahun 2017.

Selama tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa rata-rata lama sakit penduduk di perdesaan hampir sama dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Rata-rata lama sakit penduduk yang tinggal di perdesaan pada tahun 2016 sekitar 6,23 hari dan menurun menjadi 5,58 hari pada tahun 2017. Penurunan rata-rata lama sakit yang terjadi di perdesaan pada periode yang sama diikuti juga di daerah perkotaan. Lamanya sakit di daerah perkotaan pada periode yang sama menurun dari 5,69 hari menjadi 5,34 hari selama tahun 2016-2017. Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Pemberian ASI Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang, karena ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi, dan melindungi tubuh bayi dari alergi dan diare serta penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti makanan/ minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Pada tahun 2017 rata-rata lamanya baduta disusui adalah selama 11,01 bulan. Di daerah perkotaan seorang ibu sedikit lebih lama menyusui anaknya. Trend keadaan ini digambarkan pada Tabel 2.3 yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, di daerah perkotaan rata-rata lamanya baduta disusui adalah selama 11,04 bulan dan di daerah perdesaan rata-rata lamanya baduta disusui selama 11,01.

Tabel 2.3 Rata-rata Lama Baduta Disusui Menurut Tipe Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2016-2017

Daerah Tempat Tinggal	Rata-rata Lama Disusui (bulan)	
	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	10,93	11,04
Perdesaan	10,69	11,01
Perkotaan+ Perdesaan	10,75	11,01

Sumber: BPS, 2018

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, rata-rata lama pemberian ASI berada di kisaran 8 hingga 12 bulan. Rata-rata lama pemberian ASI tertinggi terjadi di Kabupaten Bireuen yang mencapai rata-rata 12,26 bulan pemberian ASI, berikutnya yaitu Kabupaten Aceh Jaya mencapai 12,25 bulan, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Langsa dengan rata-rata lama pemberian ASI 8,88 bulan. Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran II (2).

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya.

Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Secara rinci Tabel 2.4 menunjukkan bahwa tahun 2017 perempuan umur 15-49 Tahun yang pernah kawin menurut tempat melahirkan anak lahir hidup terakhir yaitu di RS/RS Bersalin memiliki persentase tertinggi dibandingkan lainnya, sebesar 31,82 persen. Kemudian Klinik/Bidan/Praktek Dokter menjadi tempat melahirkan anak lahir hidup terakhir yang memiliki persentase 30,38 persen, Puskesmas/Polides/Pustu sebesar 19,36 persen dan Rumah sebesar 17,94 persen.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan terlihat bahwa perempuan umur 15-49 Tahun yang pernah kawin menurut tempat melahirkan anak lahir hidup terakhir pada tahun 2017, RS/RS Bersalin memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 42,09 persen, sedangkan di daerah perdesaan, Klinik/Bidan/Praktek dokter memiliki persentase yang lebih tinggi yaitu sebesar 29,35 persen.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Di Aceh, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang dominan menjadi rujukan penduduk untuk berobat jalan, yaitu mencapai 42,41 persen untuk tahun 2017.

Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan Puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Tabel 2.4 Persentase Perempuan Umur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Tempat Melahirkan Anak Lahir Hidup Terakhir di Provinsi Aceh Tahun 2016-2017

Penolong Persalinan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
RS/RS Bersalin	40,76	42,09	21,06	27,54	26,62	31,82
Klinik/Bidan/Praktek dokter	41,81	32,86	35,95	29,35	37,60	30,38
Puskesmas/Polindes/Pustu	8,32	13,26	18,92	21,91	15,93	19,36
Rumah	9,11	11,67	23,98	20,55	19,78	17,94
Lainnya	0,00	0,12	0,09	0,65	0,06	0,49

Sumber: BPS, 2018

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2017

Tempat Berobat	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit	24,55	16,77	18,89
Praktek Dokter/Bidan	28,64	35,38	33,54
Klinik/Praktek Dokter Bersama	12,44	8,80	9,79
Puskesmas/Pustu	39,34	43,56	42,41
UKBM	2,16	4,28	3,70
Praktek Pengobatan Tradisional	2,09	2,37	2,30
Lainnya	0,78	1,25	1,12
% penduduk yang berobat jalan	58,43	64,24	62,55

Sumber: BPS, 2018

Pada Tabel 2.5 menyajikan persentase penduduk yang berobat jalan. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun 2017, jenis fasilitas kesehatan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk adalah puskesmas/pustu yaitu sebesar 42,41 persen.

Diikuti praktek dokter/bidan sebesar 33,54 persen. Lalu rumah sakit sebesar 18,89 persen. Kemudian klinik/praktek dokter bersama sebesar 9,79 persen dan UKBM sebesar 3,70 persen. Tempat berobat yang paling sedikit dimanfaatkan pada tahun 2016 ialah praktek pengobatan tradisional yaitu sebesar 2,30 persen dan lainnya sebesar 1,12 persen.

Menurut daerah tempat tinggal, tempat berobat puskesmas/pustu menjadi pilihan penduduk di daerah perkotaan dan perdesaan yang masing-masing sebesar 39,34 persen dan 43,56 persen.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih masih perlu didorong peningkatannya. Diharapkan terus terjadi pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis. Hal ini memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, yang juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan Tabel 2.6 menunjukkan bahwa ketersediaan Puskesmas selama 2013-2017 terjadi peningkatan yaitu dari 334 Puskesmas pada tahun 2013 menjadi 341 Puskesmas pada tahun 2017. Namun yang harus diperhatikan adalah rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk yang justru mengalami penurunan, dari 2,08 per 30.000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 1,97 per 30.000 penduduk pada tahun 2017. Ini berarti, secara rata-rata, setiap Puskesmas harus melayani sekitar 15,23 ribu penduduk pada tahun 2017, dari yang sebelumnya sekitar 14,42 ribu penduduk pada tahun 2013. Hal ini bisa disebabkan karena peningkatan jumlah puskesmas belum proporsional dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6 Jumlah Puskesmas dan Rasionya terhadap Penduduk, 2013-2017

Puskesmas dan Rasionya	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
Jumlah Puskesmas	334	337	339	340	341
Rasio Puskesmas per 30.000 Penduduk	2,08	2,06	2,03	2,00	1,97

Sumber: Aceh Dalam Angka 2016-2018

<https://aceh.bps.go.id>



BAB III

PENDIDIKAN



Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang

UU No 20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

*Dalam UU No. 20
Tahun 2003,
Pemerintah harus
mengusahakan
segala yang terkait
dengan pendidikan
baik dari sisi
penyelenggaraan,
sarana, ketersediaan
pengajar.*

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

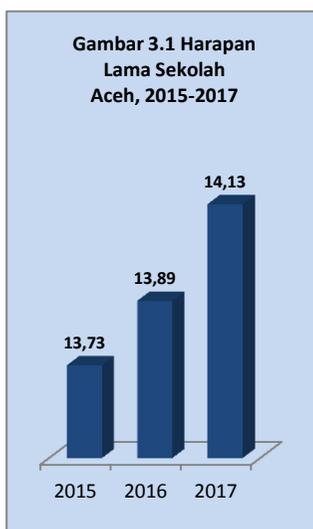
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan

ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.

Pada tahun 2017, terjadi kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh bila dibandingkan dengan tahun 2015. HLS naik dari 13,73 tahun menjadi 14,13 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di wilayah ini.



Untuk kabupaten/kota, pada tahun 2017 HLS tertinggi adalah di Kota Banda Aceh yang mencapai 17,10 tahun atau setara dengan Strata 2 (S2). HLS terendah adalah di Aceh Timur yang hanya mencapai 13,00 tahun. Sedangkan dalam kurun 2015-2016, tiga Kabupaten/Kota yang menunjukkan performa terbaik adalah Kabupaten Aceh Timur (tumbuh 3,59 persen), Kota Sabang (tumbuh 3,11 persen), dan Kabupaten Bireuen (tumbuh 2,64 persen).

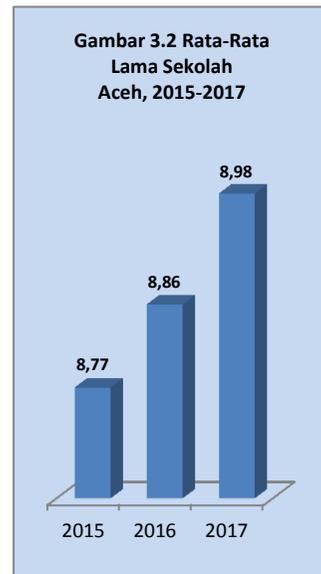
Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu

sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Aceh pada tahun 2017 tercatat 8,98 tahun. Ini berarti hingga tahun 2017, secara rata-rata penduduk Aceh usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas 2). Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 8,86 tahun. Meski naik, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Aceh yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah di kelas 3 SMP.

Untuk kabupaten/kota, pada tahun 2017 RLS tertinggi adalah di Kota Banda Aceh yang mencapai 12,59 tahun atau setara dengan SMA kelas 3. RLS terendah 7,12 tahun adalah di Kota Subulussalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Subulussalam usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan hingga kelas 1 SMP.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.



Tabel 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Aceh, 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,73	13,89	14,13
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,77	8,86	8,98

Sumber : BPS, 2018

Tingkat Pendidikan

Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk di perdesaan.

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah. Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2017, penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas meningkat dibanding tahun sebelumnya. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 64,82 persen. Terjadi penurunan persentase penduduk yang tamat SMP ke atas, baik di perdesaan maupun perkotaan. Bila diamati pada setiap jenjang pendidikan, hampir di setiap jenjang pendidikan mengalami kenaikan persentase kecuali pada jenjang SD dan yang tidak/belum tamat SD. Pada tahun 2016, penduduk yang tidak / belum tamat SD mencapai 14,69 persen, kemudian di 2017 menjadi 9,00 persen. Sedangkan untuk jenjang tamat SD sederajat di tahun 2016

mencapai 32,28 persen, turun menjadi 26,18 persen di tahun 2017.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2016 dan 2017

Tingkat Pendidikan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum tamat SD	10,43	6,38	16,49	10,16	14,69	9,00
SD Sederajat	23,85	16,83	35,84	30,35	32,28	26,18
SLTP Sederajat	13,73	19,94	15,65	25,09	15,08	23,51
SLTA Sederajat	35,50	37,83	25,36	26,32	28,37	29,86
Diploma I/II/III	4,04	5,25	2,01	2,53	2,62	3,37
Diploma IV/S1	11,62	12,78	4,55	5,47	6,65	7,72
S2/S3	0,84	0,99	0,10	0,09	0,32	0,37
SLTP +	65,72	76,79	47,67	59,49	53,03	64,82

Sumber: BPS, 2018

Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk di perdesaan. Perbedaan yang terlihat mencolok terjadi pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat dan Diploma IV/S1. Pada tahun 2017 di jenjang pendidikan SMA/Sederajat, sekitar 37,83 persen penduduk di perkotaan dan 26,32 persen penduduk di perdesaan yang menamatkan pendidikan sekolah menengah, sedangkan sekitar 5,25 persen di perkotaan mampu menamatkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi Diploma IV/S1 jauh lebih tinggi dari penduduk perdesaan yang hanya sebesar 2,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (SD, belum tamat SD, dan tidak/belum pernah sekolah) di perdesaan memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Penduduk di perdesaan yang belum menamatkan pendidikan/ tidak memiliki ijazah sekitar 10,16 persen, sedangkan di

perkotaan hanya sekitar 6,38 persen.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Pada tingkat pendidikan SMA, APM perempuan lebih besar bila dibandingkan dengan APM laki-laki.

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Pada tahun 2017 masih terdapat sekitar 0,15 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 13-15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 1,91 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Tabel 3.3 juga menunjukkan bahwa APS penduduk laki-laki maupun perempuan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun tidak menunjukkan perbedaan yang mencolok, sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun, APS perempuan lebih tinggi dibandingkan APS laki-laki. Secara keseluruhan, partisipasi sekolah menunjukkan peningkatan pada hampir semua kelompok usia.

Pada level kabupaten/kota tahun 2017, APS kelompok penduduk usia 7-12 tahun terendah di Simeulue sebesar 99,20 persen, usia 13-15 tahun di Aceh Besar sebesar 95,72 persen,

usia 16-18 tahun di Aceh Timur sebesar 68,26 persen.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2016 dan 2017

Indikator Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS						
- 7-12 tahun	99,90	99,78	99,73	99,92	99,82	99,85
-13-15 tahun	97,56	98,05	98,24	98,13	97,89	98,09
- 16-18 tahun	79,71	78,88	83,91	85,49	81,82	82,15
APM						
- SD/MI	98,58	98,57	97,72	98,51	98,16	98,54
- SMP/MTs	86,15	87,00	85,28	85,56	85,73	86,31
- SMA/SMK/MA	66,42	65,54	73,54	74,86	70,00	70,15

Sumber: BPS, 2018

Peningkatan APS diikuti pula dengan peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan untuk anak-anak mereka dengan tepat waktu. Secara umum APM SD sebesar 98,54 persen meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 98,16 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 85,73 persen pada tahun 2016 menjadi 86,31 persen pada tahun 2017. APM tingkat SMA meningkat dari 70,00 persen naik menjadi 70,15 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat pendidikan SD dan SMP untuk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, sedangkan APM SMA untuk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. APM SD untuk laki-laki tercatat sebesar 98,57 persen pada tahun 2017, sedangkan APM SD untuk perempuan sebesar 98,51 persen. Pada tingkat pendidikan SMP, APM SMP perempuan tercatat lebih rendah, sebesar 85,56 persen,

dibanding APM SMP laki-laki sebesar 87,00 persen pada tahun 2017. Pada jenjang pendidikan SMA, APM perempuan tercatat sebesar 74,86 persen berbanding 65,54 persen untuk APM laki-laki.

<https://aceh.bps.go.id>

<https://aceh.bps.go.id>



BAB IV

KETENAGAKERJAAN



Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2016 dan 2017 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. Selain itu TPAK juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas).

TPAK pada kondisi bulan Agustus 2017 di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,69 poin jika dibandingkan dengan kondisi yang sama tahun sebelumnya yaitu bulan Agustus 2016, sedangkan di daerah perdesaan naik sebesar 1,64 poin. TPAK secara umum mengalami peningkatan sebesar 1,33 poin, yaitu dari 64,26 persen pada Agustus 2016 menjadi 65,59 persen pada Agustus 2017. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, 2016 dan 2017 (Agustus)

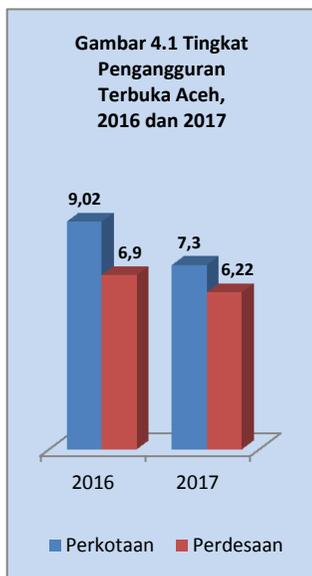
Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	64,80	65,49	9,02	7,30
Perdesaan	64,01	65,65	6,90	6,22
Perkotaan+Perdesaan	64,26	65,59	7,57	6,57

Sumber: BPS, 2018

Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2017 di perkotaan terlihat lebih tinggi jika dibandingkan di daerah perdesaan yaitu sebesar 7,30 persen berbanding 6,22 persen. Lebih tingginya TPT di daerah perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Tingginya pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan. Sementara sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di kategori pertanian, dimana kategori ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian khusus.

Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.



Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, TPT mengalami penurunan pada hampir semua jenjang pendidikan, kecuali pada jenjang SMP dan Diploma I/II/III. TPT terbesar berada pada jenjang SMK, SMA, dan

Diploma I/II/III. Ini artinya bahwa lapangan usaha untuk mereka yang berpendidikan tertinggi yang ditamatkan SMK, SMA, dan Diploma I/II/III masih cukup rendah.

Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2016 dan 2017 (Agustus)

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<=SD	5,37	3,51	2,54	2,05	3,07	2,32
SMP	5,23	3,92	2,24	4,74	3,01	4,53
SMA	12,47	9,90	13,24	11,21	12,96	10,74
SMK	13,76	10,97	15,76	10,91	14,85	10,95
Diploma I/II/III	4,14	8,10	6,93	8,29	5,79	8,20
Universitas	9,65	7,44	11,86	8,69	10,77	8,06
Total	9,02	7,30	6,90	6,22	7,57	6,57

Sumber: BPS, 2018

Di daerah perkotaan, TPT yang mengalami kenaikan hanya jenjang pendidikan Diploma I/II/III, dengan kenaikan sebesar 3,96 poin. Artinya dapat dikatakan bahwa lapangan usaha di daerah perkotaan untuk mereka yang berpendidikan Diploma I/II/III semakin sedikit. TPT di daerah perkotaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu pada jenjang pendidikan SMK sebesar 2,79 poin. Sedangkan di daerah pedesaan, TPT untuk hampir semua jenjang juga mengalami penurunan kecuali pada jenjang pendidikan SMP dan Diploma I/II/III, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 2,5 dan 1,36 poin. Penurunan TPT terbesar berada pada jenjang pendidikan SMK yang turun mencapai 4,85 poin.

Lapangan Usaha

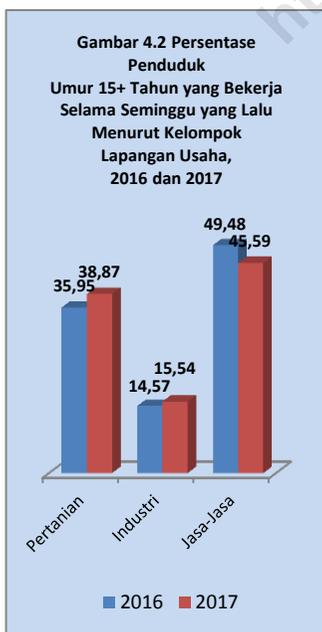
Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 kategori lapangan usaha yaitu

Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta bangunan/konstruksi), dan Jasa- jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan, pergudangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Secara umum persentase penduduk yang bekerja pada kategori lapangan usaha industri pada Agustus 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,97 poin bila dibandingkan dengan Agustus 2015 yaitu dari 14,57 persen menjadi 15,54 persen. Bila dilihat dari daerah tempat tinggal, di daerah pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,86 poin, sedangkan di daerah perkotaan juga mengalami peningkatan 1,1 poin. Kategori industri di daerah pedesaan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 14,22 persen sedangkan di daerah perkotaan mampu menyerap hingga 18,36 persen.

Kondisi berbeda terjadi pada kategori pertanian. Pada Agustus 2017 terjadi peningkatan tenaga kerja sebesar 2,92 poin atau menurun dari 35,95 persen pada Agustus 2016 menjadi 38,87 persen pada Agustus 2017. Namun jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penurunan terjadi di daerah perkotaan sebesar 2,33 poin, sebaliknya di pedesaan terjadi peningkatan yaitu sebesar 5,71 poin. Hal ini terkait dengan luasnya areal pertanian yang tersedia di pedesaan, sementara lahan di daerah perkotaan yang relatif lebih sempit sehingga penduduk bekerja lebih banyak di luar kategori pertanian.

Pada kategori jasa mengalami penurunan pada Agustus 2017 dibandingkan Agustus 2016 yaitu sebesar 3,89 poin. Daerah perkotaan merupakan kategori yang paling banyak menyerap tenaga kerja kategori jasa dibandingkan di daerah pedesaan. Hal ini seiring dengan yang terjadi di perkotaan di mana pada kondisi Agustus 2017 penyerapan tenaga kerjanya meningkat sebesar 1,23 poin. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di pedesaan yang justru menurun sebesar 6,57 poin pada periode yang sama.



Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha, 2016 dan 2017 (Agustus)

Kelompok Usaha	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian (A)	15,89	13,56	45,00	50,71	35,95	38,87
Industri (M)	17,26	18,36	13,36	14,22	14,57	15,54
Jasa-Jasa (S)	66,85	68,08	41,64	35,07	49,48	45,59

Catatan : Cakupan lapangan usaha Pertanian (A) adalah Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.
 Cakupan lapangan usaha Industri (M) adalah Pertambangan; Industri Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air; serta Bangunan.
 Cakupan lapangan usaha Jasa-Jasa (S) adalah Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel; Angkutan, Pergudangan, Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan.

Sumber: BPS, 2018

Status Pekerjaan Utama

Dilihat dari status pekerjaannya, penduduk yang bekerja pada umumnya berstatus sebagai “buruh/karyawan/pegawai”, yaitu sebesar 36,86 persen dari total penduduk usia kerja yang bekerja. Kemudian yang berstatus “berusaha sendiri” mencapai 20,46 persen. Disusul persentase penduduk yang bekerja dengan status “berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar” mencapai 14,62 persen, selanjutnya yang berstatus “pekerja keluarga/tak dibayar” mencapai 13,80 persen. Untuk status pekerjaan lainnya, persentasenya sangat kecil yaitu yang berstatus “pekerja bebas di pertanian” sebesar 5,63 persen, yang berstatus “pekerja bebas di non pertanian” sebesar 5,06 persen dan terakhir yang berstatus “berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar” sebesar 3,57 persen.

Sepanjang tahun 2016-2017, terdapat 4 status pekerjaan utama penduduk yang bekerja yang mengalami kenaikan yaitu

pada penduduk berstatus "berusaha sendiri" sebanyak 15.987 jiwa, yang berstatus "berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar" sebanyak 24.411 jiwa, yang berstatus "pekerja bebas di pertanian" sebanyak 28.812 jiwa, dan yang berstatus "pekerja keluarga/tak dibayar" sebanyak 12.396 jiwa. Sedangkan status pekerjaan utama penduduk yang mengalami penurunan yaitu yang berstatus "berusaha dibantu buruh tetap" sebanyak 11.194 jiwa, "buruh/karyawan/pegawai" sebanyak 18.294 jiwa, dan "pekerja bebas di nonpertanian" sebanyak 651 jiwa.

Tabel 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Aceh Tahun 2013 - 2017 (Agustus)

Status Pekerjaan Utama	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Berusaha Sendiri	392 201	422 393	375 121	421 668	437 655
B. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh Tidak Dibayar	299 941	303 880	310 957	288 238	312 649
C. Berusaha dibantu buruh tetap	93 228	86 990	87 576	87 443	76 249
D. Buruh/Karyawan/ Pegawai	631 598	682 857	688 918	806 524	788 230
E. Pekerja Bebas di Pertanian	62 625	65 827	96 740	91 511	120 323
F. Pekerja Bebas di Non Pertanian	46 907	67 193	90 596	108 846	108 195
G. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	298 086	302 683	316 110	282 815	295 211
Total	1 824 586	1 931 823	1 966 018	2 087 045	2 138 512

Sumber: BPS, 2018

Untuk mengetahui status pekerjaan/kegiatan formal dan informal dapat dilihat berdasarkan status pekerjaan utama ini. Diantara tujuh status pekerjaan utama yang dapat dikelompokkan dalam kegiatan formal ialah yang berstatus "buruh/karyawan/pegawai" dan "berusaha dengan dibantu buruh tetap", sedangkan lima status pekerjaan utama lainnya dikelompokkan pada kategori kegiatan informal. Pada tahun 2017, penduduk bekerja pada kategori formal sebanyak 864.479 jiwa

atau sebesar 40,42 persen, menurun dibanding tahun 2016 yang mencapai 893.967 jiwa atau sebesar 42,83 persen. Sedangkan pada kategori informal sebanyak 1.274.033 jiwa atau sebesar 59,58 persen, meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 1.193.078 jiwa atau sebesar 57,17 persen.

<https://aceh.bps.go.id>



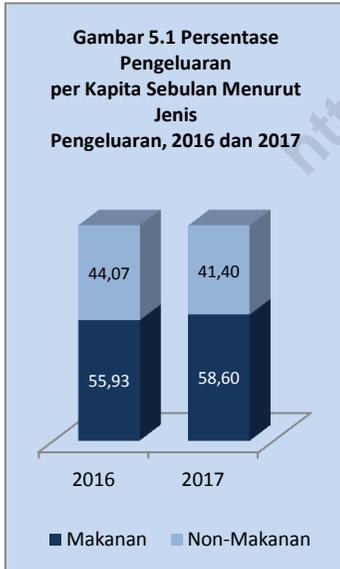
BAB V

TARAF DAN POLA KONSUMSI



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga



Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2016 dan 2017 (Maret)

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	451.952	529 162	55,93	58,60
Bukan Makanan	356.142	373 833	44,07	41,40
Perumahan	176.297	169 055	21,82	18,72
Barang dan Jasa	85.163	89 888	10,54	9,95
Pakaian	37.630	43 381	4,66	4,80
Barang Tahan Lama	27.909	32 242	3,45	3,57
Lainnya	29.143	39 267	3,61	4,35
Jumlah	808.094	902 995	100,00	100,00

Sumber: BPS, 2018

Selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 808.094,- menjadi Rp 902.995,-. Bila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan mengalami peningkatan dari 55,93 persen pada tahun 2016 menjadi 58,60 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan menurun dari 44,07 persen menjadi 41,40 persen, namun secara nominal, pengeluaran rata-rata per kapita untuk bukan makanan juga meningkat. Peningkatan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada hampir semua jenis pengeluaran, namun jika dilihat secara persentase, terdapat dua kelompok yang mengalami penurunan yaitu perumahan dari 21,82 persen di tahun 2016 menjadi 18,72 persen di tahun 2017 dan barang dan jasa dari 10,54 persen menjadi 9,95 persen di tahun 2017.

Tabel 5.2 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), 2016 dan 2017 (Maret)

Klasifikasi Daerah	Makanan		Bukan Makanan		Makanan + Bukan Makanan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	548 853	610 733	559 493	576 135	1 108 347	1 186 868
Perdesaan	412 252	494 151	272 829	287 005	685 080	781 156
Perkotaan+ Perdesaan	451 952	529 162	356 142	373 833	808 094	902 995

Sumber: BPS, 2018

Dilihat dari klasifikasi daerah, pada 2017, penduduk perkotaan memiliki pola konsumsi yang serupa dengan penduduk pedesaan. Prioritas terhadap konsumsi makanan baik bagi penduduk pedesaan maupun perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan konsumsi non makanan. Proporsi konsumsi makanan penduduk pedesaan mencapai 63,26 persen (Rp 494.151,-) terhadap total rata-rata pengeluaran, sedangkan proporsi bagi penduduk perkotaan sebesar 51,46 persen (Rp 610.733,-). Di sini penduduk pedesaan memiliki kecenderungan yang lebih besar dalam konsumsi makanan dibanding penduduk perkotaan. Adapun untuk rata-rata pengeluaran per kapita sebulan secara keseluruhan, pada tahun 2017 di daerah pedesaan sebesar Rp. 781.156,- dan di perkotaan sebesar Rp. 1.186.868,-.

Jika diperhatikan pengeluaran untuk makanan dan non makanan menurut golongan pengeluaran per kapita, rata-rata pengeluaran makanan perkapita pada semua golongan pengeluaran mengalami kenaikan, sedangkan untuk non makanan hampir semuanya mengalami penurunan.

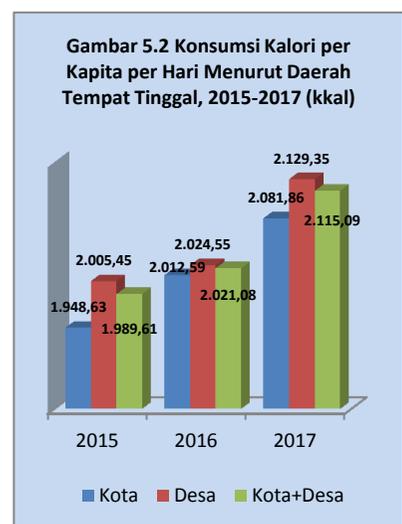
Tabel 5.3 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah), 2016 dan 2017 (Maret)

Golongan Pengeluaran per Kapita	Makanan		Bukan Makanan	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 150 000	0	0	0	
150 000 - 199 999	112 663	129 005	70 259	52 605
200 000 - 299 999	171 263	188 991	90 002	77 775
300 000 - 499 999	266 382	274 673	144 963	133 234
500 000 - 749 999	380 656	407 944	223 022	208 646
750 000 - 999 999	509 544	557 804	351 925	311 208
> 1 000 000	777 880	843 098	831 661	768 591
Total	451 952	529 162	356 142	373 833

Sumber: BPS, 2018

Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.



Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2017 sebanyak 2.115,09 kkal atau naik sebesar 94,01 kkal dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2.021,08 kkal, hal ini berarti untuk tahun 2017 konsumsi kalori per hari penduduk belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi. Untuk memenuhinya masih diperlukan penambahan sebanyak 34,91 kkal. Seperti halnya konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga mengalami peningkatan, yaitu dari 55,13 gram pada tahun 2016 menjadi 59,63 gram pada tahun 2017 protein yang dikonsumsi penduduk, yang berarti sudah memenuhi ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.

Tabel 5.4 Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2017

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kalori (kkal/kapita/hari)			
2015	1.948,63	2.005,45	1.989,61
2016	2.012,59	2.024,55	2.021,08
2017	2.081,86	2.129,35	2.115,09
Protein (gram/kapita/hari)			
2015	55,97	55,33	54,08
2016	57,77	54,07	55,13
2017	62,43	58,42	59,63

Sumber: BPS, 2018

Apabila dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori penduduk di perkotaan selama kurun waktu 2015-2017 terus meningkat, yaitu 1.948,63 kkal pada tahun 2015 naik menjadi 2.012,59 kkal pada tahun

2016 dan kembali naik menjadi 2.081,86 kkal pada tahun 2017. Konsumsi kalori di daerah pedesaan juga mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 2017. Pada tahun 2015, konsumsi kalori per kapita penduduk pedesaan sebesar 2.005,45 kkal. Pada tahun 2016 dan 2017 meningkat dengan nilai selalu lebih besar dibanding konsumsi kalori penduduk perkotaan yaitu sebesar 2.024,55 kkal dan 2.129,35 kkal.

Sama halnya dengan kalori, konsumsi protein penduduk di perkotaan dan pedesaan juga cenderung mengalami peningkatan selama periode 2015-2017. Kecuali di tahun 2016, konsumsi protein per kapita penduduk pedesaan menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 55,33 di tahun 2015 menjadi 54,07 gram, sebelum akhirnya kembali meningkat menjadi 58,42 gram. Konsumsi protein penduduk yang tinggal di perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan penduduk yang tinggal di pedesaan. Penduduk perkotaan sudah mencapai standar kecukupan protein pada tahun 2016 dengan konsumsi mencapai 57,77 gram, dan kembali meningkat konsumsinya menjadi 62,43 gram di tahun 2017. Sedangkan penduduk pedesaan di tahun 2017 sudah berhasil memenuhinya. Baik kecukupan kalori maupun protein bagi penduduk Indonesia dan penduduk Aceh pada khususnya harus terus diperhatikan karena untuk kecukupan gizi yang baik akan menjamin kualitas pembangunan manusia untuk ke depannya.



BAB VI

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumah tangga dan juga tempat penampungan kotoran akhir.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga dan sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan yang buruk sangat berperan sebagai media penularan penyakit diantara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu ukuran kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk tiap anggota keluarga.

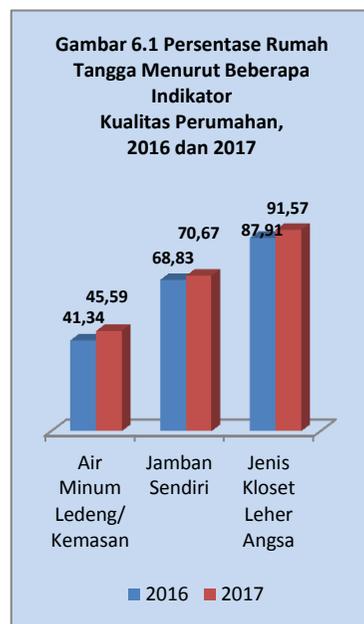
Tabel 6.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 rumah tangga di Provinsi Aceh yang tinggal di rumah lebih dari 10 m2 per kapita tercatat sebesar 76,69 persen, naik dari tahun 2016 yang sebesar 70,33 persen.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah tinggal akan menentukan tingkat kenyamanan dan kesehatan rumah tinggal tersebut yang juga menentukan kualitasnya. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sumber air minum yang bersih dan sehat, jamban yang dimiliki sendiri dan jenis kloset yang digunakan.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2017, rumah tangga yang menggunakan air ledeng atau air kemasan sebagai sumber air minumannya mengalami kenaikan yaitu 45,59 persen, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,34 persen. Terdapat perbedaan yang cukup nyata antara rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, dimana pada tahun 2017 rumah tangga yang

Pada tahun 2017 secara keseluruhan di Provinsi Aceh, baru terdapat 45,59 persen rumah tangga yang minum menggunakan air minum ledeng/kemnasan, di mana di perkotaan sudah sebanyak 76,85 persen, sedangkan di perdesaan masih sekitar 32,33 persen.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016 dan 2017



menggunakan air ledeng dan air kemasan sebagai sumber air minumnya mencapai 76,85 persen untuk daerah perkotaan, sedangkan untuk rumah tangga yang tinggal di daerah perdesaan hanya 32,33 persen.

Fasilitas lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan jamban sendiri. Selama tahun 2016-2017 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat di daerah perkotaan dan di perdesaan. Pada tahun 2016 tercatat sekitar 68,83 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 70,67 persen. Dimana rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebagian besar adalah rumah tangga di daerah perkotaan, yaitu sekitar 87,19 persen, sedangkan di daerah perdesaan sekitar 63,66 persen.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2016 dan 2017

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Luas Lantai Perkapita > 10 m ²	76,70	81,94	67,85	74,46	70,33	76,69
Air Minum Ledeng/ Kemasan	73,02	76,85	28,57	32,33	41,34	45,59
Jamban Sendiri	86,95	87,19	61,59	63,66	68,83	70,67
Jenis Kloset Leher Angsa	93,15	96,81	85,24	88,54	87,91	91,57

Sumber: BPS, 2018

Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah jenis kloset yang digunakan, dimana jenis kloset yang terbaik digunakan untuk kesehatan lingkungan adalah kloset leher angsa. Pada tahun 2017, ada sekitar 91,57 persen rumah tangga yang menggunakan kloset leher angsa, meningkat dibanding tahun 2016 yang sebesar 87,91 persen. Sama halnya dengan fasilitas perumahan lainnya, rumah tangga yang memiliki kloset leher angsa juga sebagian besar adalah rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan dari pada di daerah perdesaan, yaitu masing-masing 96,81 persen dan 88,54 persen.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2016 dan 2017

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+ Perdesaan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri	69,93	68,33	86,38	85,55	81,66	80,42
Kontrak/Sewa	15,85	16,43	2,39	2,44	6,26	6,61
Milik Orang tua/Keluarga	11,65	12,08	9,95	9,67	10,44	10,39
Lainnya	2,57	3,15	1,28	2,35	1,65	2,59

Sumber: BPS, 2018

Pada tahun 2017, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 80,42 persen, mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Ini berarti masih ada sebesar 19,58 persen rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri, sedang rumah tangga yang menempati rumah kontrak/sewa dan milik orang tua/keluarga masing-masing 6,61 persen dan 10,39 persen.

Jika ditinjau menurut tipe daerah, terlihat bahwa di daerah perdesaan persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri lebih besar yaitu sekitar 85,55 persen dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sekitar 68,33 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang sewa/kontrak di daerah

perdesaan lebih kecil dari pada daerah perkotaan, yaitu masing-masing 2,44 persen dan 16,43 persen. Hal ini berkaitan dengan daya tarik perkotaan, yaitu penduduk yang pindah untuk bekerja dan sekolah di daerah perkotaan serta harga rumah yang jauh lebih mahal dari pada daerah perdesaan sehingga mereka lebih memilih menempati rumah sewa/kontrak karena belum mampu membeli atau membangun rumah sendiri.

<https://aceh.bps.go.id>

<https://aceh.bps.go.id>



BAB VII

KEMISKINAN



Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap wilayah, termasuk di Provinsi Aceh. Angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi sehingga pembangunan yang dijalankan belum mampu menekan angka kemiskinan secara optimal.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak, baik dari pemerintah, maupun dari lembaga penelitian, sektor swasta, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Aceh menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2012-2017. Tahun 2012, jumlah penduduk miskin sebesar 909,00 ribu jiwa atau 19,46 persen dari jumlah seluruh penduduk Aceh. Pemerintah terus berupaya menekan

angka kemiskinan, dan sampai pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 840,71 ribu jiwa atau 17,60 persen dari jumlah penduduk. Tahun 2014 tercatat jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 881,26 ribu jiwa atau 18,05 persen dari jumlah penduduk. Penduduk miskin kembali turun pada tahun 2015, menjadi 851,59 ribu jiwa (17,08 persen), begitu juga pada tahun 2016 yang kembali menurun menjadi 848,44 ribu jiwa (16,73 persen), namun pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 872,61 ribu jiwa (16,89 persen).

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Aceh, 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2012	171,80	737,20	909,00	13,07	21,97	19,46
2013	156,37	684,34	840,71	11,59	19,96	17,60
2014	161,94	719,31	881,26	11,76	20,52	18,05
2015	157,57	694,01	851,59	11,13	19,44	17,08
2016	159,50	688,94	848,44	10,82	19,15	16,73
2017	172,35	700,26	872,61	11,11	19,37	16,89

Catatan : Data kemiskinan merupakan kondisi bulan Maret

Sumber: BPS, 2018

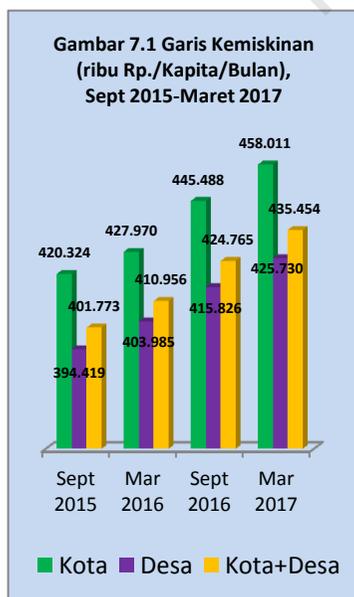
Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Tahun 2012, jumlah penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 737,20 ribu jiwa atau 21,97 persen dari total penduduk dan di tahun 2017 berkurang menjadi 700,26 ribu jiwa (19,37 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan selama periode 2012-2017 juga menunjukkan tren yang berfluktuasi. Tahun 2012 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 171,80 ribu jiwa

atau 13,07 persen dari total penduduk namun di tahun 2017 naik menjadi 172,35 ribu jiwa (11,11 persen).

Selama periode Maret 2016 sampai Maret 2017, persentase penduduk miskin di sebagian besar kabupaten/kota di Aceh juga mengalami peningkatan, kecuali Aceh Barat, Aceh Besar, Bireuen, dan Bener Meriah yang mengalami penurunan pada Maret 2017. Dari segi jumlah, pada Maret 2017 penduduk miskin dominan berada di Aceh Utara, Pidie, dan Bireuen. Sementara itu, secara persentase Aceh Singkil merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya pada Maret 2017.

Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Aceh mengalami peningkatan setiap tahun selama periode September 2015-Maret 2017, September 2015 sebesar Rp 401.773,- dan di Maret 2017 sebesar Rp 435.454,-. Garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Pada Maret 2017 garis kemiskinan di perkotaan sebesar Rp 458.011,-, sedangkan di perdesaan sebesar Rp 425.730,-.



Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P_1 cenderung menurun dari periode Maret 2016 hingga Maret 2017, dimana nilai Maret 2016 sebesar 3,48 dan Maret 2017 menurun menjadi 2,98. Nilai P_1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin sempit. Dengan nilai P_1 yang semakin rendah menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan menjadi berkurang. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, P_1 di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini mencerminkan masih banyak penduduk miskin di perdesaan

yang rata-rata pengeluarannya lebih jauh dari garis kemiskinan dibanding penduduk miskin di perkotaan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih diprioritaskan di daerah perdesaan untuk dapat membebaskan penduduk dengan kondisi miskin “terlalu dalam”.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan, September 2015-Maret 2017

Indikator	September 2015	Maret 2016	September 2016	Maret 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	401.773	410.956	424.765	435.454
Perkotaan	420.324	427.970	445.488	458.011
Perdesaan	394.419	403.985	415.826	425.730
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁)	3,11	3,48	3,06	2,98
Perkotaan	1,84	2,30	1,45	1,55
Perdesaan	3,61	3,96	3,74	3,59
Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂)	0,84	1,00	0,87	0,81
Perkotaan	0,50	0,70	0,28	0,35
Perdesaan	0,98	1,12	1,11	1,00

Sumber : BPS, 2018

Indeks keparahan kemiskinan (P₂) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P₂ mengalami penurunan dari Maret 2016 (1,00) hingga Maret 2017 (0,81). Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menurun pada Maret 2017. Nilai P₂ di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding penduduk miskin yang tinggal di perkotaan.



BAB VIII

SOSIAL LAINNYA



Pembahasan mengenai aspek sosial lainnya difokuskan pada kegiatan yang mencerminkan kesejahteraan seseorang, seperti kepemilikan alat telekomunikasi dan informasi. Karena kepemilikan alat komunikasi dan informasi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat digambarkan dengan tingkat kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Selain itu, pada bab ini juga dibahas mengenai aspek sosial-ekonomi rumah tangga dengan melihat banyaknya rumah tangga yang membeli beras murah/miskin (raskin).

Kepemilikan Alat Komunikasi dan Informasi

Persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangganya memiliki komputer/notebook mengalami peningkatan yaitu dari 17,48 persen tahun 2016 menjadi 18,50 persen tahun 2017

Keadaan sosial ekonomi rumah tangga dapat juga digambarkan melalui kepemilikan alat komunikasi dan informasi. Semakin banyak penduduk yang memiliki alat komunikasi dan informasi menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pada tabel 7.1 memperlihatkan bahwa persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki alat komunikasi berupa handphone (HP) sebanyak 54,21 persen. Jika dilihat dari tipe daerah, persentase penduduk yang memiliki Handphone (HP) lebih tinggi di daerah perkotaan yaitu sebesar 65,29 persen dan di perdesaan hanya sebesar 36,65 persen. Pada tahun 2017 penduduk 5 tahun keatas yang mengakses internet sebesar 22,86 persen. Jika ditinjau menurut tipe daerah, terlihat bahwa di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 36,65 persen dan 16,93 persen.

Tabel 8.1 Persentase Penduduk 5 tahun keatas yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Aceh Tahun 2017

Jenis Alat yang Dimiliki/ Dikuasai	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Handphone (HP)	65,29	49,45	54,21
Mengakses Internet	36,65	16,93	22,86

Sumber: BPS, 2018

Tabel 8.2 memperlihatkan bahwa persentase kepemilikan alat komunikasi dan informasi selama periode 2016 – 2017, persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah meningkat dari 0,52 persen menjadi 0,74 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon di daerah perkotaan sebesar 2,05 persen. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, hanya sebesar 0,18 persen.

Tabel 8.2.a Persentase Rumah Tangga Perkotaan yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Jenis Alat Yang Dimiliki/Dikuasai	Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Telepon Rumah (PSTN)	5,22	4,04	1,72	1,35	2,05
Komputer/ notebook	32,21	33,73	34,72	34,91	35,49

Sumber : BPS, 2018

Tabel 8.2.b Persentase Rumah Tangga Perdesaan yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Jenis Alat Yang Dimiliki/Dikuasai	Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Telepon Rumah (PSTN)	2,62	2,45	0,19	0,18	0,18
Komputer/ notebook	6,64	7,81	9,85	10,45	11,29

Sumber : BPS, 2018

Tabel 8.2.c Persentase Rumah Tangga Perkotaan Dan Perdesaan yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

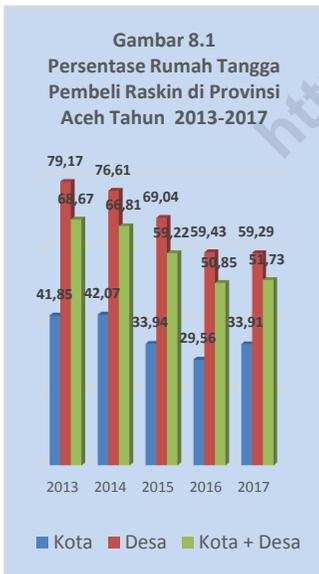
Jenis Alat Yang Dimiliki/Dikuasai	Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Telepon Rumah (PSTN)	3,35	2,90	0,62	0,52	0,74
Komputer/ notebook	13,83	15,16	16,81	17,48	18,50

Sumber : BPS, 2018

Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang memiliki komputer/notebook sekitar 18,50 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2016 yang sebesar 17,48 persen. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer/notebook yang tinggal di daerah perkotaan jauh lebih tinggi daripada daerah perdesaan, masing-masing yaitu sebesar 35,49 persen dan 11,29 persen.

Pembelian Beras Raskin

Selain kegiatan melakukan perjalanan dan kepemilikan alat komunikasi dan informasi, aspek kesejahteraan lain yang dapat dilihat adalah keadaan sosial ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini hanya dibatasi pada banyaknya rumah tangga yang membeli beras miskin (raskin). Raskin disediakan oleh Bulog untuk rumah tangga miskin dan mereka memperolehnya dengan cara membeli di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti pasar, kelurahan/kantor desa, atau tempat-tempat umum lainnya.



Tabel 8.3 memperlihatkan bahwa, rumah tangga yang membeli raskin pada periode 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu dari 50,85 persen menjadi 51,73 persen. Jika dilihat antara daerah perkotaan dan perdesaan terlihat bahwa di daerah perkotaan juga mengalami peningkatan yaitu dari 29,56 persen menjadi 33,91 persen. Sebaliknya di daerah perdesaan justru mengalami penurunan yaitu dari 59,43 persen menjadi 59,29 persen.

Rata-rata banyaknya raskin yang dibeli pada tahun 2017 sekitar 13,54 kilogram per rumah tangga. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 14,30 kilogram per rumah tangga. Pada tahun 2016, raskin dapat dibeli dengan harga rata-rata Rp. 1.487,70 per kilogram, sedangkan pada tahun 2017 harga rata-rata raskin tersebut turun menjadi Rp. 1.456,73 per kilogram.

Tabel 8.3.a Beberapa Indikator Raskin Menurut Daerah Perkotaan di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Indikator	Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rumah tangga pembeli raskin	41,85	42,07	33,94	29,56	33,91
Rata-rata raskin yang dibeli (Kg)	7,55	6,80	12,20	13,43	11,28
Rata-rata harga raskin per kg (Rp)	1 951,38	1 694,26	2 268,06	1 594,8	1 242,94

Sumber: BPS, 2018

Tabel 8.3.b Beberapa Indikator Raskin Menurut Daerah Perdesaan di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Indikator	Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rumah tangga pembeli raskin	79,17	76,61	69,04	59,43	59,29
Rata-rata raskin yang dibeli (Kg)	15,29	14,15	13,14	14,47	14,09
Rata-rata harga raskin per kg (Rp)	1 967,10	1 678,07	2 086,67	1 467,25	1 508,62

Sumber: BPS, 2018

Tabel 8.3.c Beberapa Indikator Raskin Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017

Indikator	Kota				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rumah tangga pembeli raskin	68,67	66,81	59,22	50,85	51,73
Rata-rata raskin yang dibeli (Kg)	13,12	12,07	12,99	14,30	13,54
Rata-rata harga raskin per kg (Rp)	1 964,56	1 680,66	2 115,75	1 487,70	1 456,73

Sumber: BPS, 2018



DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010- 2035*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2012. *Aceh Dalam Angka 2012*. Banda Aceh.
- , 2012. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2012*. Banda Aceh.
- , 2013. *Aceh Dalam Angka 2013*. Banda Aceh.
- , 2013. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2013*. Banda Aceh.
- , 2014. *Aceh Dalam Angka 2014*. Banda Aceh.
- , 2014. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2014*. Banda Aceh.
- , 2015. *Aceh Dalam Angka 2015*. Banda Aceh.
- , 2015. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2015*. Banda Aceh.
- , 2016. *Aceh Dalam Angka 2016*. Banda Aceh.
- , 2016. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2016*. Banda Aceh.
- , 2017. *Aceh Dalam Angka 2017*. Banda Aceh.
- , 2017. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2017*. Banda Aceh.
- , 2018. *Aceh Dalam Angka 2018*. Banda Aceh.
- , 2018. *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Aceh 2018*. Banda Aceh.
- , 2018. *Statistik Pengeluaran Rumah Tangga Provinsi Aceh 2018*. Banda Aceh.

<https://aceh.bps.go.id>



LAMPIRAN



I

(1) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Penduduk (jiwa)				Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)		
	2014	2015	2016	2017	2014-2015	2015-2016	2016-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Simeulue	87 598	89 117	90 291	91 372	1,73	1,32	1,20
Aceh Singkil	112 161	114 518	116 712	119 490	2,10	1,92	2,38
Aceh Selatan	220 971	224 897	228 603	231 893	1,78	1,65	1,44
Aceh Tenggara	196 249	200 014	204 468	208 481	1,92	2,23	1,96
Aceh Timur	394 933	402 976	411 279	419 594	2,04	2,06	2,02
Aceh Tengah	192 204	196 090	200 412	204 273	2,02	2,20	1,93
Aceh Barat	190 244	193 791	197 921	201 682	1,86	2,13	1,90
Aceh Besar	384 618	392 584	400 913	409 109	2,07	2,12	2,04
Pidie	410 580	418 882	425 974	432 599	2,02	1,69	1,56
Bireuen	423 397	435 300	443 627	453 224	2,81	1,91	2,16
Aceh Utara	572 961	583 892	593 492	602 554	1,91	1,64	1,53
Aceh Barat Daya	138 140	140 689	143 312	145 726	1,85	1,86	1,68
Gayo Lues	86 262	87 881	89 500	91 024	1,88	1,84	1,70
Aceh Tamiang	272 228	278 324	282 921	287 007	2,24	1,65	1,44
Nagan Raya	152 352	155 070	158 223	161 329	1,78	2,03	1,96
Aceh Jaya	86 123	86 385	87 622	89 618	0,30	1,43	2,28
Bener Meriah	134 015	136 821	139 890	142 526	2,09	2,24	1,88
Pidie Jaya	145 584	148 719	151 472	154 795	2,15	1,85	2,19
Banda Aceh	249 499	250 303	254 904	259 913	0,32	1,84	1,97
Sabang	32 739	33 215	33 622	33 978	1,45	1,23	1,06
Langsa	162 814	165 890	168 820	171 574	1,89	1,77	1,63
Lhokseumawe	187 455	191 407	195 186	198 980	2,11	1,97	1,94
Subulussalam	73 708	75 188	77 084	78 725	2,01	2,52	2,13
Aceh	4 906 835	5 001 953	5 096 248	5 189 466	1,94	1,89	1,83

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035

I

(2) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Penduduk Menurut Jenis Kelamin (jiwa), 2017			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Simeulue	46 975	44 397	91 372	105,81
Aceh Singkil	60 396	59 094	119 490	102,20
Aceh Selatan	114 179	117 714	231 893	97,00
Aceh Tenggara	104 110	104 371	208 481	99,75
Aceh Timur	209 579	210 015	419 594	99,79
Aceh Tengah	102 882	101 391	204 273	101,47
Aceh Barat	102 099	99 583	201 682	102,53
Aceh Besar	209 593	199 516	409 109	105,05
Pidie	209 272	223 327	432 599	93,71
Bireuen	221 798	231 426	453 224	95,84
Aceh Utara	297 890	304 664	602 554	97,78
Aceh Barat Daya	72 277	73 449	145 726	98,40
Gayo Lues	45 132	45 892	91 024	98,34
Aceh Tamiang	144 926	142 081	287 007	102,00
Nagan Raya	81 507	79 822	161 329	102,11
Aceh Jaya	46 482	43 136	89 618	107,76
Bener Meriah	72 423	70 103	142 526	103,31
Pidie Jaya	75 418	79 377	154 795	95,01
Banda Aceh	133 728	126 185	259 913	105,98
Sabang	17 392	16 586	33 978	104,86
Langsa	85 072	86 502	171 574	98,35
Lhokseumawe	99 282	99 698	198 980	99,58
Subulussalam	39 728	38 997	78 725	101,87
Aceh	2 592 140	2 597 326	5 189 466	99,80

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035

I

(3) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Persentase Terhadap Luas Aceh	Kepadatan Penduduk per Km ²			Persentase Penduduk		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Simeulue	3,22	49	49	50	1,78	1,77	1,76
Aceh Singkil	3,27	62	63	64	2,29	2,29	2,30
Aceh Selatan	7,36	54	55	56	4,50	4,49	4,47
Aceh Tenggara	7,34	48	49	50	4,00	4,01	4,02
Aceh Timur	9,56	74	76	77	8,06	8,07	8,09
Aceh Tengah	7,85	44	45	46	3,92	3,93	3,94
Aceh Barat	4,86	70	72	73	3,87	3,88	3,89
Aceh Besar	5,11	135	138	141	7,85	7,87	7,88
Pidie	5,58	132	134	136	8,37	8,36	8,34
Bireuen	3,16	242	247	252	8,70	8,70	8,73
Aceh Utara	4,75	217	220	224	11,67	11,65	11,61
Aceh Barat Daya	3,32	75	76	77	2,81	2,81	2,81
Gayo Lues	9,78	16	16	16	1,76	1,76	1,75
Aceh Tamiang	3,73	131	133	135	5,56	5,55	5,53
Nagan Raya	6,24	44	45	46	3,10	3,10	3,11
Aceh Jaya	6,83	22	23	23	1,73	1,72	1,73
Bener Meriah	3,35	72	73	75	2,74	2,74	2,75
Pidie Jaya	1,67	157	160	163	2,97	2,97	2,98
Banda Aceh	0,10	4 470	4 552	4 641	5,00	5,00	5,01
Sabang	0,22	272	276	279	0,66	0,66	0,65
Langsa	0,36	817	832	845	3,32	3,31	3,31
Lhokseumawe	0,27	1 251	1 276	1 301	3,83	3,83	3,83
Subulussalam	2,07	64	66	67	1,50	1,51	1,52
Aceh	100,00	88	90	91	1,78	1,77	100

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035

I

(4) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama (%), 2017				Jumlah
	10-15	16-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	5,91	27,28	52,26	14,54	100,00
Aceh Singkil	4,70	30,22	52,06	13,02	100,00
Aceh Selatan	4,56	25,87	54,97	14,61	100,00
Aceh Tenggara	2,56	23,15	56,12	18,16	100,00
Aceh Timur	4,09	27,92	54,74	13,25	100,00
Aceh Tengah	3,88	22,48	57,86	15,78	100,00
Aceh Barat	8,88	23,01	54,20	13,91	100,00
Aceh Besar	2,00	20,45	53,36	24,20	100,00
Pidie	3,89	25,34	54,42	16,35	100,00
Bireuen	1,92	24,86	50,46	22,77	100,00
Aceh Utara	6,94	30,57	50,58	11,90	100,00
Aceh Barat Daya	9,14	22,34	52,45	16,07	100,00
Gayo Lues	3,03	20,45	64,74	11,78	100,00
Aceh Tamiang	4,31	23,30	56,11	16,28	100,00
Nagan Raya	9,32	26,90	54,40	9,38	100,00
Aceh Jaya	6,95	32,95	49,39	10,71	100,00
Bener Meriah	2,84	19,51	55,88	21,77	100,00
Pidie Jaya	5,46	19,45	56,14	18,95	100,00
Banda Aceh	2,58	13,68	56,00	27,74	100,00
Sabang	3,01	20,05	53,18	23,77	100,00
Langsa	5,07	11,57	61,07	22,28	100,00
Lhokseumawe	6,23	18,60	52,23	22,95	100,00
Subulussalam	7,79	35,05	42,57	14,59	100,00
Aceh	4,73	23,97	53,99	17,31	100,00

Sumber: BPS, 2018

II

(1) Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup (tahun)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	64,22	64,23	64,24	64,66	64,78	64,90
Aceh Singkil	66,85	66,91	66,94	66,97	67,02	67,07
Aceh Selatan	63,12	63,16	63,18	63,61	63,75	63,89
Aceh Tenggara	66,96	67,03	67,07	67,40	67,51	67,62
Aceh Timur	68,02	68,05	68,06	68,20	68,26	68,33
Aceh Tengah	68,30	68,35	68,38	68,44	68,48	68,53
Aceh Barat	67,25	67,30	67,33	67,49	67,56	67,62
Aceh Besar	69,41	69,44	69,46	69,47	69,49	69,52
Pidie	66,25	66,27	66,28	66,46	66,52	66,58
Bireuen	70,32	70,34	70,35	70,64	70,72	70,80
Aceh Utara	68,40	68,41	68,42	68,48	68,51	68,54
Aceh Barat Daya	63,63	63,69	63,72	64,20	64,35	64,51
Gayo Lues	64,38	64,42	64,44	64,77	64,88	64,98
Aceh Tamiang	68,65	68,66	68,67	68,99	69,08	69,16
Nagan Raya	68,26	68,28	68,29	68,59	68,67	68,76
Aceh Jaya	66,39	66,45	66,48	66,63	66,70	66,77
Bener Meriah	68,58	68,62	68,64	68,79	68,85	68,90
Pidie Jaya	69,07	69,11	69,13	69,49	69,59	69,68
Banda Aceh	70,76	70,79	70,80	70,89	70,92	70,96
Sabang	69,54	69,54	69,54	69,93	70,01	70,09
Langsa	68,75	68,78	68,79	68,94	69,00	69,06
Lhokseumawe	70,59	70,61	70,62	70,96	71,05	71,14
Subulussalam	62,83	62,86	62,87	63,27	63,42	63,56
Aceh	69,23	69,31	69,35	69,50	69,51	69,52

Sumber: BPS, 2018

II

(2) Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Pemberian ASI Pada Baduta (bulan), 2017
(1)	(2)
Simeulue	11,13
Aceh Singkil	11,24
Aceh Selatan	9,74
Aceh Tenggara	11,98
Aceh Timur	10,33
Aceh Tengah	10,01
Aceh Barat	9,85
Aceh Besar	11,49
Pidie	12,26
Bireuen	11,10
Aceh Utara	11,23
Aceh Barat Daya	11,40
Gayo Lues	10,98
Aceh Tamiang	11,87
Nagan Raya	10,74
Aceh Jaya	12,25
Bener Meriah	10,33
Pidie Jaya	11,23
Banda Aceh	11,01
Sabang	10,82
Langsa	8,88
Lhokseumawe	10,55
Subulussalam	10,89
Aceh	11,01

Sumber: BPS, 2018

III

(1) Indikator Pendidikan

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS) Aceh (tahun)						Pertumbuhan 2016-2017 (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Simeulue	12,67	12,67	12,75	12,83	13,07	13,23	1,22
Aceh Singkil	13,49	13,85	14,05	14,26	14,27	14,28	0,07
Aceh Selatan	12,57	13,01	13,05	13,24	13,53	13,80	2,00
Aceh Tenggara	13,18	13,54	13,59	13,62	13,96	13,97	0,07
Aceh Timur	11,69	11,76	11,83	12,23	12,55	13,00	3,59
Aceh Tengah	13,55	13,76	14,11	14,21	14,23	14,24	0,07
Aceh Barat	14,29	14,32	14,35	14,55	14,56	14,57	0,07
Aceh Besar	13,91	14,21	14,35	14,47	14,48	14,49	0,07
Pidie	13,21	13,36	13,50	13,61	13,93	14,25	2,30
Bireuen	14,03	14,22	14,25	14,41	14,42	14,80	2,64
Aceh Utara	13,77	13,89	13,99	14,10	14,11	14,42	2,20
Aceh Barat Daya	12,98	13,02	13,11	13,20	13,54	13,55	0,07
Gayo Lues	12,89	13,01	13,03	13,13	13,27	13,28	0,08
Aceh Tamiang	12,57	12,79	13,27	13,54	13,55	13,56	0,07
Nagan Raya	13,27	13,34	13,42	14,04	14,09	14,10	0,07
Aceh Jaya	13,30	13,69	13,81	13,93	13,94	13,95	0,07
Bener Meriah	12,78	12,93	13,02	13,04	13,42	13,43	0,07
Pidie Jaya	13,76	13,92	14,03	14,14	14,51	14,52	0,07
Banda Aceh	16,16	16,26	16,36	17,01	17,03	17,10	0,41
Sabang	12,07	12,23	12,39	12,98	13,17	13,58	3,11
Langsa	13,93	14,25	14,58	15,16	15,17	15,18	0,07
Lhokseumawe	14,91	14,92	15,11	15,14	15,16	15,17	0,07
Subulussalam	13,03	13,16	13,30	13,73	14,18	14,19	0,07
Aceh	13,19	13,36	13,53	13,73	13,89	14,13	1,73

Sumber: BPS, 2018



(2) Indikator Pendidikan

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Aceh (tahun)						Pertumbuhan 2016-2017 (%)
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Simeulue	8,34	8,55	8,89	8,90	8,91	9,06	1,68
Aceh Singkil	7,16	7,33	7,48	7,50	7,69	7,84	1,95
Aceh Selatan	7,56	7,59	7,60	7,79	8,02	8,33	3,87
Aceh Tenggara	8,57	8,58	8,77	9,32	9,33	9,63	3,22
Aceh Timur	7,13	7,28	7,38	7,40	7,60	7,80	2,63
Aceh Tengah	9,19	9,25	9,31	9,65	9,66	9,67	0,10
Aceh Barat	7,77	7,83	8,17	8,47	8,70	9,04	3,91
Aceh Besar	9,45	9,46	9,61	9,91	9,92	9,93	0,10
Pidie	8,08	8,15	8,25	8,74	8,75	8,76	0,11
Bireuen	8,50	8,58	8,85	9,14	9,15	9,16	0,11
Aceh Utara	7,69	7,83	8,06	8,07	8,09	8,10	0,12
Aceh Barat Daya	7,53	7,69	7,89	7,90	7,93	8,12	2,40
Gayo Lues	6,88	7,00	7,04	7,06	7,10	7,39	4,08
Aceh Tamiang	7,66	7,69	7,71	7,95	8,21	8,47	3,17
Nagan Raya	7,73	7,78	7,93	8,22	8,24	8,25	0,12
Aceh Jaya	7,64	7,70	7,88	7,89	7,95	8,13	2,26
Bener Meriah	8,63	8,93	9,00	9,42	9,43	9,55	1,27
Pidie Jaya	7,93	7,95	8,30	8,45	8,46	8,84	4,49
Banda Aceh	12,07	12,19	12,37	12,38	12,57	12,59	0,16
Sabang	10,16	10,21	10,35	10,37	10,51	10,70	1,81
Langsa	10,43	10,47	10,48	10,49	10,71	10,90	1,77
Lhokseumawe	10,16	10,37	10,39	10,41	10,53	10,88	3,32
Subulussalam	6,53	6,65	6,77	6,78	6,88	7,12	3,49
Aceh	8,36	8,44	8,71	8,77	8,86	8,98	1,35

Sumber: BPS, 2018

III

(3) Indikator Pendidikan

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	100,00	98,56	97,78	95,13	84,70	87,34
Aceh Singkil	100,00	99,12	94,05	98,52	72,78	78,87
Aceh Selatan	100,00	100,00	96,04	95,73	80,19	81,71
Aceh Tenggara	100,00	100,00	99,33	98,45	76,70	80,15
Aceh Timur	100,00	100,00	92,41	98,94	69,33	62,08
Aceh Tengah	100,00	99,40	97,60	98,91	76,44	81,17
Aceh Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	86,42	82,29
Aceh Besar	100,00	100,00	92,89	96,03	74,42	77,89
Pidie	100,00	100,00	98,03	97,62	83,23	88,85
Bireuen	100,00	100,00	98,63	99,59	81,62	77,34
Aceh Utara	99,34	100,00	99,32	97,34	76,88	76,08
Aceh Barat Daya	100,00	98,97	96,56	96,57	90,43	79,79
Gayo Lues	100,00	100,00	97,49	100,00	84,74	88,85
Aceh Tamiang	100,00	100,00	100,00	98,84	62,10	69,03
Nagan Raya	100,00	98,77	98,23	97,60	90,18	83,34
Aceh Jaya	100,00	99,17	97,17	97,45	81,02	81,28
Bener Meriah	99,57	100,00	94,34	97,99	86,96	77,54
Pidie Jaya	100,00	99,40	97,43	99,02	87,38	79,44
Banda Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00	97,09	93,47
Sabang	99,61	100,00	94,59	100,00	90,84	82,30
Langsa	100,00	99,19	100,00	96,43	75,61	81,01
Lhokseumawe	100,00	100,00	100,00	98,42	82,18	81,20
Subulussalam	100,00	99,30	98,67	98,91	88,51	78,60
Aceh	99,90	99,78	97,56	98,05	79,71	78,88

Sumber: BPS, 2018



(4) Indikator Pendidikan

Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	100,00	100,00	97,23	100,00	94,86	85,57
Aceh Singkil	100,00	99,59	98,29	97,79	91,34	81,50
Aceh Selatan	99,06	100,00	96,72	100,00	88,89	85,44
Aceh Tenggara	99,08	100,00	100,00	100,00	86,37	88,33
Aceh Timur	100,00	100,00	98,70	95,83	77,82	74,72
Aceh Tengah	100,00	100,00	100,00	96,57	87,87	87,70
Aceh Barat	99,59	100,00	100,00	100,00	83,07	90,49
Aceh Besar	100,00	99,66	95,60	95,41	78,68	93,14
Pidie	99,12	100,00	97,74	98,38	90,14	91,28
Bireuen	100,00	100,00	97,85	98,71	76,71	81,96
Aceh Utara	100,00	100,00	97,80	96,15	74,30	83,50
Aceh Barat Daya	100,00	99,16	98,97	97,49	82,61	84,96
Gayo Lues	98,88	100,00	100,00	100,00	79,37	93,32
Aceh Tamiang	100,00	99,88	95,93	100,00	84,07	88,01
Nagan Raya	98,61	100,00	100,00	100,00	96,69	91,41
Aceh Jaya	100,00	100,00	100,00	97,77	85,96	80,23
Bener Meriah	100,00	100,00	100,00	100,00	83,94	79,71
Pidie Jaya	100,00	100,00	100,00	98,72	82,35	73,03
Banda Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00	96,42	93,89
Sabang	100,00	100,00	100,00	100,00	95,51	99,61
Langsa	100,00	100,00	98,22	100,00	90,73	79,03
Lhokseumawe	100,00	100,00	98,29	100,00	89,72	85,24
Subulussalam	97,57	99,22	100,00	98,95	90,38	88,84
Aceh	99,73	99,92	98,24	98,13	83,91	85,49

Sumber: BPS, 2018



(5) Indikator Pendidikan

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	7-12		13-15		16-18	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	100,00	99,20	97,54	97,19	89,75	86,44
Aceh Singkil	100,00	99,34	96,32	98,13	82,33	80,15
Aceh Selatan	99,57	100,00	96,37	97,69	84,75	83,67
Aceh Tenggara	99,57	100,00	99,63	99,15	81,67	83,50
Aceh Timur	100,00	100,00	95,77	97,39	73,27	68,26
Aceh Tengah	100,00	99,71	98,63	97,68	81,87	84,06
Aceh Barat	99,79	100,00	100,00	100,00	84,79	86,31
Aceh Besar	100,00	99,83	94,04	95,72	76,89	84,78
Pidie	99,57	100,00	97,89	97,96	86,64	90,04
Bireuen	100,00	100,00	98,27	99,17	79,24	79,54
Aceh Utara	99,65	100,00	98,60	96,79	75,49	80,16
Aceh Barat Daya	100,00	99,06	97,92	97,02	87,53	82,63
Gayo Lues	99,49	100,00	98,53	100,00	81,76	91,08
Aceh Tamiang	100,00	99,94	97,99	99,41	71,50	78,77
Nagan Raya	99,35	99,35	99,10	98,65	93,46	87,42
Aceh Jaya	100,00	99,57	98,39	97,60	83,17	80,79
Bener Meriah	99,77	100,00	97,83	99,03	85,47	78,45
Pidie Jaya	100,00	99,72	98,65	98,87	84,96	76,57
Banda Aceh	100,00	100,00	100,00	100,00	96,74	93,70
Sabang	99,79	100,00	97,34	100,00	93,86	91,66
Langsa	100,00	99,59	99,14	98,19	84,21	79,94
Lhokseumawe	100,00	100,00	99,23	99,15	86,17	83,20
Subulussalam	98,84	99,26	99,29	98,93	89,37	83,82
Aceh	99,82	99,85	97,89	98,09	81,82	82,15

Sumber: BPS, 2018



(6) Indikator Pendidikan

Laki-laki

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	100,00	98,56	90,40	95,13	71,55	87,34
Aceh Singkil	100,00	99,12	85,93	90,81	62,45	69,73
Aceh Selatan	100,00	97,74	84,21	82,03	59,01	62,46
Aceh Tenggara	100,00	100,00	92,11	90,44	65,75	72,77
Aceh Timur	99,34	100,00	80,60	85,89	45,06	47,22
Aceh Tengah	97,19	99,40	90,38	97,15	72,31	70,01
Aceh Barat	98,64	100,00	88,27	91,22	74,65	72,92
Aceh Besar	98,51	96,78	81,03	79,34	65,28	60,21
Pidie	98,29	95,76	78,87	82,74	67,77	63,92
Bireuen	97,81	98,33	82,63	83,74	66,36	63,49
Aceh Utara	98,38	97,01	87,99	87,69	67,36	61,13
Aceh Barat Daya	99,36	98,97	81,62	82,30	77,68	72,58
Gayo Lues	97,55	100,00	89,55	87,50	74,40	69,10
Aceh Tamiang	97,88	100,00	92,06	90,35	55,54	54,12
Nagan Raya	98,82	98,77	86,92	76,58	64,86	65,97
Aceh Jaya	97,88	99,17	91,26	97,45	71,85	74,29
Bener Meriah	96,26	100,00	85,46	97,99	68,13	72,21
Pidie Jaya	97,19	99,40	91,61	97,04	71,04	74,76
Banda Aceh	97,05	100,00	92,90	85,89	95,18	78,15
Sabang	98,84	100,00	90,56	91,26	67,21	81,08
Langsa	99,77	99,19	84,15	93,23	57,23	74,29
Lhokseumawe	100,00	100,00	91,10	84,61	77,09	73,03
Subulussalam	99,41	99,30	93,52	89,38	74,02	74,30
Aceh	98,58	98,57	86,15	87,00	66,42	65,54

Sumber: BPS, 2018



(7) Indikator Pendidikan

Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	100,00	100,00	89,89	85,70	85,59	72,97
Aceh Singkil	100,00	99,59	89,76	81,80	83,12	75,15
Aceh Selatan	97,98	97,29	92,42	90,94	81,03	74,30
Aceh Tenggara	98,12	100,00	91,26	91,25	79,47	69,49
Aceh Timur	97,47	98,74	85,14	85,96	60,28	62,39
Aceh Tengah	99,08	100,00	95,62	83,00	70,21	73,18
Aceh Barat	93,16	100,00	83,42	80,15	76,37	76,59
Aceh Besar	96,58	96,57	77,31	82,56	68,02	78,79
Pidie	94,18	95,91	80,17	78,01	82,50	87,06
Bireuen	96,97	98,92	85,26	88,80	66,74	76,28
Aceh Utara	99,32	97,10	82,52	88,12	60,09	69,42
Aceh Barat Daya	94,71	99,16	83,60	80,18	73,04	76,50
Gayo Lues	98,88	100,00	89,19	87,17	69,53	77,21
Aceh Tamiang	98,80	96,23	81,78	88,31	77,79	77,72
Nagan Raya	98,53	100,00	90,70	98,00	79,07	77,14
Aceh Jaya	97,48	100,00	93,65	85,11	73,14	74,08
Bener Meriah	98,44	100,00	96,41	83,39	77,24	68,91
Pidie Jaya	99,12	100,00	91,26	81,36	79,60	73,03
Banda Aceh	99,94	100,00	70,68	77,38	77,23	78,42
Sabang	98,27	99,94	95,41	100,00	92,52	83,87
Langsa	99,24	100,00	85,95	74,32	89,30	71,78
Lhokseumawe	99,31	100,00	90,33	98,16	84,15	82,03
Subulussalam	97,57	99,22	90,85	91,83	86,64	84,35
Aceh	97,72	98,51	85,28	85,56	73,54	74,86

Sumber: BPS, 2018



(8) Indikator Pendidikan

Laki-laki+Perempuan

Kabupaten/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	100,00	99,20	90,18	91,14	78,53	80,07
Aceh Singkil	100,00	99,34	87,98	86,04	73,08	72,36
Aceh Selatan	99,07	97,53	88,15	86,13	70,56	68,66
Aceh Tenggara	99,12	100,00	91,73	90,81	72,81	71,42
Aceh Timur	98,40	99,42	83,02	85,93	52,13	54,64
Aceh Tengah	98,20	99,71	92,64	89,71	71,31	71,41
Aceh Barat	95,77	100,00	85,91	86,39	75,49	74,72
Aceh Besar	97,62	96,67	79,44	80,91	66,87	68,61
Pidie	96,29	95,83	79,48	80,57	75,03	75,31
Bireuen	97,38	98,62	83,85	86,14	66,54	69,58
Aceh Utara	98,82	97,05	85,41	87,89	63,44	65,69
Aceh Barat Daya	97,10	99,06	82,74	81,27	75,96	74,73
Gayo Lues	98,16	100,00	89,40	87,37	71,70	73,15
Aceh Tamiang	98,34	98,12	86,98	89,36	65,06	66,23
Nagan Raya	98,68	99,35	88,79	85,98	72,04	71,61
Aceh Jaya	97,67	99,57	92,29	91,56	72,41	74,20
Bener Meriah	97,28	100,00	92,20	90,43	72,63	70,83
Pidie Jaya	98,18	99,72	91,44	89,19	75,16	73,99
Banda Aceh	98,34	100,00	82,31	81,57	85,79	78,29
Sabang	98,57	99,97	93,54	95,12	83,56	82,59
Langsa	99,51	99,59	85,01	83,93	75,46	72,93
Lhokseumawe	99,66	100,00	90,76	90,93	80,83	77,49
Subulussalam	98,53	99,26	92,28	90,53	79,84	79,42
Aceh	98,16	98,54	85,73	86,31	70,00	70,15

Sumber: BPS, 2018

IV

Indikator Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota	TPAK (%)		TPT (%)	
	2015	2017	2015	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Simeulue	57,81	63,51	8,51	3,12
Aceh Singkil	63,83	59,43	7,03	7,14
Aceh Selatan	58,63	59,70	10,01	7,24
Aceh Tenggara	71,03	72,82	9,79	4,75
Aceh Timur	63,14	59,55	13,89	8,42
Aceh Tengah	74,58	76,80	3,13	3,91
Aceh Barat	63,67	60,34	6,77	6,20
Aceh Besar	61,90	59,17	6,81	8,49
Pidie	64,34	63,05	10,25	7,64
Bireuen	62,38	70,61	11,02	4,50
Aceh Utara	55,65	57,21	17,05	11,02
Aceh Barat Daya	62,26	62,01	11,66	3,16
Gayo Lues	79,09	74,57	2,24	1,71
Aceh Tamiang	63,44	62,82	14,03	5,43
Nagan Raya	59,51	62,75	3,97	4,11
Aceh Jaya	71,04	66,92	4,91	6,23
Bener Meriah	85,94	79,49	1,04	1,06
Pidie Jaya	63,64	60,12	9,18	4,89
Banda Aceh	61,05	60,45	12,00	7,75
Sabang	71,42	69,52	7,62	3,00
Langsa	63,43	70,84	8,55	7,03
Lhokseumawe	59,38	62,60	13,06	10,51
Subulussalam	65,90	61,85	8,24	4,91
Aceh	63,44	63,74	9,93	6,57

Sumber: BPS, 2018

VI

(1) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dengan Luas Lantai per Kapita < 10m ² (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	31,19	42,16	31,42	34,94	27,22
Aceh Singkil	39,17	37,89	36,96	37,99	33,52
Aceh Selatan	23,07	30,46	23,13	20,74	14,55
Aceh Tenggara	38,16	37,09	30,25	31,78	31,41
Aceh Timur	37,77	41,12	32,74	43,50	35,29
Aceh Tengah	26,53	28,17	26,02	23,74	17,09
Aceh Barat	21,73	26,22	24,65	20,09	13,98
Aceh Besar	31,48	30,69	29,84	31,92	25,65
Pidie	30,74	26,82	22,49	26,27	20,56
Bireuen	34,27	35,13	28,30	31,28	21,97
Aceh Utara	39,58	41,87	35,23	38,71	30,96
Aceh Barat Daya	23,22	23,81	19,97	23,59	17,55
Gayo Lues	22,77	28,56	25,64	35,86	30,04
Aceh Tamiang	25,37	33,29	24,78	29,62	20,01
Nagan Raya	21,11	23,33	21,03	23,57	16,69
Aceh Jaya	35,61	32,11	26,81	21,61	21,83
Bener Meriah	20,35	21,13	17,56	13,48	11,69
Pidie Jaya	28,37	30,78	35,52	36,30	32,03
Banda Aceh	23,30	24,86	21,27	21,03	15,74
Sabang	23,76	24,60	23,97	25,02	28,83
Langsa	26,34	29,13	20,25	25,35	17,53
Lhokseumawe	27,47	36,53	24,40	27,20	22,92
Subulussalam	33,24	35,88	32,11	27,41	18,70
Aceh	30,25	32,38	27,24	29,61	23,31

Sumber: BPS, 2018

VI

(2) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dengan Air Minum Ledeng/Isi Ulang/ Air kemasan (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	48,72	42,93	48,04	49,92	78,54
Aceh Singkil	29,63	38,31	31,85	30,93	43,95
Aceh Selatan	14,53	19,55	27,37	31,78	42,47
Aceh Tenggara	14,05	14,70	16,93	16,64	34,24
Aceh Timur	34,58	27,05	27,16	29,48	39,01
Aceh Tengah	28,65	30,33	27,45	27,90	39,74
Aceh Barat	43,14	47,41	38,33	46,53	61,45
Aceh Besar	58,72	69,11	72,74	65,90	75,73
Pidie	22,18	22,57	23,45	23,11	44,43
Bireuen	33,10	31,03	33,09	32,22	38,72
Aceh Utara	35,83	27,41	31,79	23,30	53,79
Aceh Barat Daya	18,75	24,80	19,03	32,07	47,28
Gayo Lues	21,88	27,23	21,82	33,08	71,24
Aceh Tamiang	56,80	60,78	55,16	56,10	69,44
Nagan Raya	13,89	21,37	17,54	18,85	23,01
Aceh Jaya	35,54	38,31	34,74	38,62	49,46
Bener Meriah	33,61	23,29	28,71	30,88	38,69
Pidie Jaya	45,48	41,76	40,42	39,93	45,72
Banda Aceh	98,54	98,01	98,82	98,86	99,47
Sabang	86,37	88,33	83,92	87,58	84,55
Langsa	79,03	74,25	74,62	74,64	80,65
Lhokseumawe	82,91	81,75	81,78	85,79	91,90
Subulussalam	28,60	26,05	25,93	31,22	39,36
Aceh	41,03	40,86	40,91	41,34	58,41

Sumber: BPS, 2018

VI

(3) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dengan Jamban Sendiri (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	66,84	76,26	60,17	68,24	72,06
Aceh Singkil	63,02	68,51	66,98	73,75	70,98
Aceh Selatan	53,89	85,52	63,80	65,51	66,25
Aceh Tenggara	38,05	52,83	49,21	53,59	53,98
Aceh Timur	69,49	67,68	59,88	65,14	63,42
Aceh Tengah	63,47	76,36	77,19	73,48	79,67
Aceh Barat	65,91	72,70	73,78	77,52	75,68
Aceh Besar	69,93	70,09	81,16	82,01	78,01
Pidie	30,02	63,43	39,16	44,10	46,79
Bireuen	66,21	82,98	72,45	71,47	67,97
Aceh Utara	60,46	69,31	64,71	61,86	67,35
Aceh Barat Daya	37,49	75,12	41,73	46,31	53,02
Gayo Lues	29,63	46,36	36,92	41,62	52,74
Aceh Tamiang	89,86	84,33	86,78	87,24	87,98
Nagan Raya	56,39	83,19	66,90	62,08	71,57
Aceh Jaya	73,68	80,20	68,19	75,03	75,27
Bener Meriah	75,00	87,01	80,17	83,86	89,64
Pidie Jaya	41,20	67,68	51,23	51,90	58,68
Banda Aceh	86,01	93,38	86,59	87,18	88,31
Sabang	79,78	81,57	82,53	86,59	85,88
Langsa	86,71	75,11	87,48	87,90	90,13
Lhokseumawe	83,25	78,70	83,65	86,05	86,79
Subulussalam	62,38	85,68	66,94	75,18	79,36
Aceh	62,50	72,71	67,12	68,88	70,67

Sumber: BPS, 2018

VI

(4) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/Kota	Rumah Tangga Jenis Kloset Leher Angsa (%)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Simeulue	89,86	87,65	96,92	91,10	89,16
Aceh Singkil	51,29	50,23	66,95	70,07	88,07
Aceh Selatan	88,77	92,84	90,01	97,91	95,50
Aceh Tenggara	74,69	82,05	84,97	84,06	96,15
Aceh Timur	44,22	52,25	70,08	65,92	74,65
Aceh Tengah	87,53	86,48	79,04	88,98	91,75
Aceh Barat	91,86	83,99	97,91	96,05	97,17
Aceh Besar	98,86	95,70	90,26	99,39	99,56
Pidie	84,97	81,32	89,75	92,24	99,15
Bireuen	88,70	87,00	91,44	93,27	88,95
Aceh Utara	80,52	81,63	82,75	76,20	79,10
Aceh Barat Daya	77,40	77,07	77,30	93,91	98,73
Gayo Lues	81,57	83,82	70,26	82,18	93,27
Aceh Tamiang	69,91	75,15	74,01	78,61	85,24
Nagan Raya	76,99	76,37	73,62	71,04	89,39
Aceh Jaya	97,60	95,78	97,99	98,10	100,00
Bener Meriah	81,05	83,37	82,60	89,01	94,95
Pidie Jaya	97,45	96,29	86,20	89,34	98,88
Banda Aceh	100,00	99,78	99,22	100,00	100,00
Sabang	98,25	97,82	99,31	95,98	100,00
Langsa	91,19	89,67	95,08	97,47	95,99
Lhokseumawe	90,59	95,12	97,99	97,49	97,18
Subulussalam	62,03	66,29	76,31	79,42	92,80
Aceh	82,75	83,40	85,88	87,91	91,57

Sumber: BPS, 2018

VII

Indikator Kemiskinan

Kabupaten/Kota	Jml Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2016	Maret 2017	Maret 2016	Maret 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Simeulue	17,93	18,40	19,93	20,20	326 563	350 622
Aceh Singkil	25,09	26,27	21,60	22,11	368 968	406 015
Aceh Selatan	30,68	32,51	13,48	14,07	304 466	332 177
Aceh Tenggara	29,39	30,84	14,46	14,86	221 799	250 854
Aceh Timur	61,63	63,67	15,06	15,25	350 186	369 911
Aceh Tengah	33,16	34,24	16,64	16,84	397 859	427 170
Aceh Barat	40,11	40,72	20,38	20,28	441 909	446 614
Aceh Besar	62,03	62,72	15,55	15,41	384 545	398 752
Pidie	90,16	92,35	21,25	21,43	393 370	408 150
Bireuen	70,44	71,54	15,95	15,87	317 562	335 314
Aceh Utara	115,05	118,74	19,46	19,78	301 733	318 729
Aceh Barat Daya	25,73	26,57	18,03	18,31	306 930	329 543
Gayo Lues	19,48	19,91	21,86	21,97	301 546	323 482
Aceh Tamiang	40,88	42,01	14,51	14,69	368 691	389 459
Nagan Raya	30,31	31,06	19,25	19,34	374 236	400 811
Aceh Jaya	13,10	13,23	15,01	14,85	331 940	356 060
Bener Meriah	29,82	29,99	21,43	21,14	363 796	383 289
Pidie Jaya	31,94	33,60	21,18	21,82	399 377	429 966
Banda Aceh	18,80	19,23	7,41	7,44	541 732	572 295
Sabang	5,81	5,98	17,33	17,66	492 787	523 705
Langsa	18,63	19,20	11,09	11,24	323 246	347 056
Lhokseumawe	23,28	24,40	11,98	12,32	319 988	343 558
Subulussalam	14,99	15,44	19,57	19,71	250 408	273 370
Aceh	848,44	872,61	16,73	16,89	410 956	435 454

Sumber: BPS, 2018

<https://aceh.bps.go.id>

SUMBER DATA

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 6 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010.

SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah:

- a) Konsumsi/Pengeluaran
- b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga

meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantra statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga.

Survei Angkatan Kerja Nasional

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan-bulan Februari, Mei, Agustus, dan November.

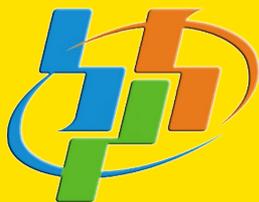
Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2011 Sakernas dilakukan semesteran. Untuk tahun 2005, Sakernas dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2006 - 2011 dilakukan pada bulan Februari dan Agustus.

Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei, Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi Kementerian/Instansi Pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Kesehatan.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh 23121

Telp: (0651) 23005 Fax: (0651) 33632, Email: bps1100@bps.go.id

Homepage: <http://aceh.bps.go.id>